



HAMENGKU BUWONO X
GUBERNUR DIY



PAKU ALAM X
WAKIL GUBERNUR DIY

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024

Assalamu 'alaikum warahmatullaahi wa barakatuh
Salam sejahtera bagi kita semua.

Saudara-saudara warga masyarakat DIY yang saya hormati dan cintai. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran *Allah Subhanahu Wata'ala* atas semua limpahan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyusun Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pemerintah Daerah DIY Tahun 2024.

Penyusunan dan penyampaian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) ini merupakan perwujudan dari tanggung jawab kami sebagai Gubernur kepada masyarakat DIY. Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini juga merupakan tanggung jawab pelaksanaan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang bahwa Kepala Daerah wajib menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan DIY sangat terkait dengan visi-misi Pemerintah Daerah DIY. Visi Gubernur Tahun 2022 – 2027 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) DIY Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2022-2027 yang telah ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 28 April 2023 pada intinya adalah ***untuk lebih mewujudkan kekurangan pencapaian pada Visi-Misi sebelumnya*** (yaitu “*Renaissance Yogyakarta/Among Tani Dagang Layar 2012 – 2017*” dan “*Menyongsong Abad Samudra untuk Kemuliaan Martabat Manusia Yogyakarta 2017- 2022*”), yang kemudian dikemas dalam lima tujuan mulia (Pancamulia), serta sekaligus menanggapi isu-isu nasional maupun global saat ini. Dalam cakupan maksud sebagaimana disampaikan di atas, maka Visi Gubernur DIY 2022 – 2027 adalah:

***Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi
Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya
Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.***

Terwujudnya ‘Pancamulia’, menyandang misi untuk menjawab isu-isu strategis yang dihadapi DIY, melalui capaian-capaian yang dapat diukur dengan beberapa ukuran seperti: 1) Semakin kecilnya tingkat kemiskinan, 2) Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan, 3) Lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram, 4) Kehidupan ekonomi yang layak, 5) Mengecilnya ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah), serta 6) *Good-governance* pada berbagai tingkatan.

Dengan rumusan Visi sebagaimana diutarakan di atas, maka dapat dirumuskan empat (4) misi yang pada prinsipnya merupakan pernyataan usaha atau apa-apa yang harus dikerjakan agar Visi yang diharapkan dapat terwujud. Dari visi ***Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi***, terdapat empat Misi yang dapat dirumuskan yakni:

1. Meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui Reformasi Kalurahan;
2. Memberdayakan Kawasan Selatan dengan mengoptimalkan dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan /pengelolaan sumber daya setempat;

- 3. Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemanfaatan kemajuan teknologi informasi;
- 4. Melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan yang lebih baik.

Adapun tema pembangunan tahun 2024 mempedomani tujuan dan sasaran pembangunan dalam Dokumen RPJMD DIY Tahun 2022-2027 yang dalam perumusannya mengacu pada visi, misi, dan sasaran pokok tahap keempat rencana pembangunan jangka panjang, memperhatikan dokumen rencana pembangunan jangka menengah nasioanl (RPJMN 2020-2024), serta isu-isu strategis yang aktual. Tema pembangunan tahun 2024 juga mengacu pada rumusan tema pembangunan nasional sebagaimana dimuat dalam Rencana Kerja Pembangunan (RKP 2024).

Dengan berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan sejalan dengan tema RKP 2024 yang tidak mengalami perubahan sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 dan hasil evaluasi capaian tema pembangunan s.d Triwulan II tahun 2024 dengan hasil yang optimis tercapai di Tahun 2024 maka tema Perubahan RKPDIY Tahun 2024 masih tetap sama dengan tema RKPDIY Tahun 2024 yaitu:

“Pemerataan Aksesibilitas Layanan Publik yang Berkualitas dan Aktivitas Ekonomi Berbasis Sektor Unggulan”

Tema tersebut mengandung pernyataan kunci sebagai berikut:

- 1. Pemerataan aksesibilitas layanan publik Pemerataan aksesibilitas layanan publik dimaksudkan bahwa layanan publik yang tersedia mampu diakses masyarakat secara lebih mudah dan merata dengan tetap memperhatikan pemerataan pada kualitas layanan publik tersebut;
- 2. Pemerataan aktivitas ekonomi Aktivitas ekonomi dimaknai dengan penumbuhan pusat-pusat pertumbuhan baru terutama pada sektor unggulan (pariwisata, pertanian, dan koperasi umkm) yang lebih difokuskan pada kawasan selatan.

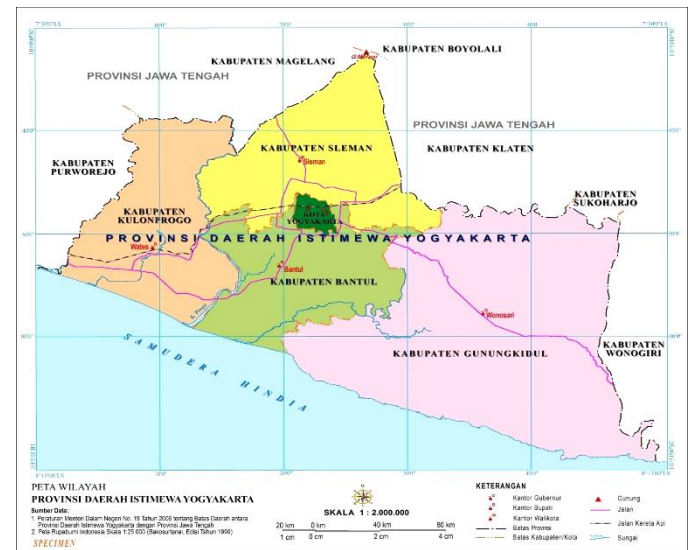
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) DIY Tahun 2024 merupakan laporan mengenai capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Selama tahun 2024 penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah pada umumnya telah dilaksanakan dan berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagai berikut:

GAMBARAN UMUM:

Daerah Istimewa Yogyakarta posisinya terletak diantara 7°.33’-8°.12’ Lintang Selatan dan 110°.00’-110°.50’ Bujur Timur, tercatat memiliki luas wilayah daratan 3.133,15 km² atau 0,16% dari luas wilayah daratan Indonesia (1.916.906,77 km²). Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi dengan luas wilayah terkecil kedua setelah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang terdiri dari:

- 1. Kabupaten Kulon Progo, dengan luas 586,28 km² (18,71%);
- 2. Kabupaten Bantul, dengan luas 508,13 km² (16,22%);
- 3. Kabupaten Gunungkidul, dengan luas 1.431,42 km² (45,69%);
- 4. Kabupaten Sleman, dengan luas 574,82 km² (18,35%);
- 5. Kota Yogyakarta, dengan luas 32,50 km² (1,04%).

Peta Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta



Sumber: Lampiran UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY

Grafik Luas Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Kabupaten/Kota



Sumber: BPS, 2024

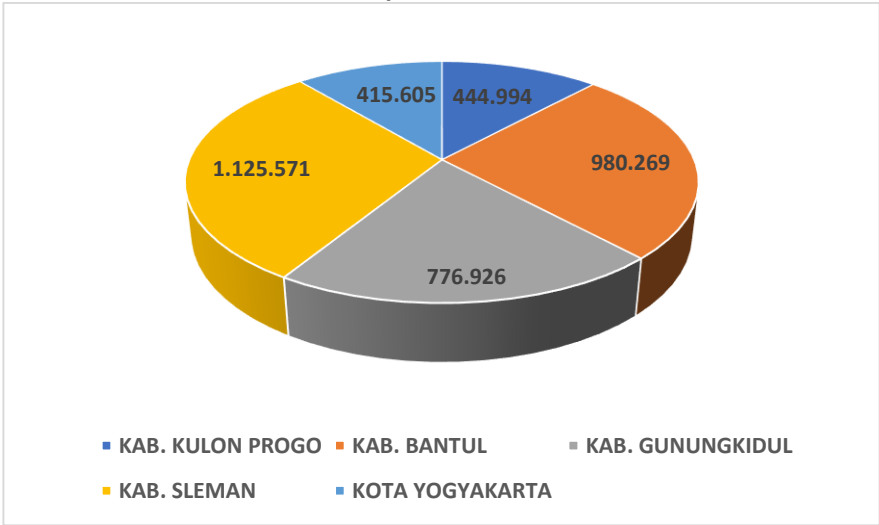
Jumlah penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2024 berdasarkan data kependudukan Daerah Istimewa Yogyakarta Semester 2 tahun 2024 (Per 31 Desember 2024) adalah sebanyak 3.743.365 orang. Persebaran penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta menurut kabupaten/kota tahun 2024 terbanyak berada di Kabupaten Sleman yaitu sejumlah 1.125.571 orang (30,07%) diikuti oleh Kabupaten Bantul sejumlah 980.269 orang (26,19%), Kabupaten Gunungkidul sejumlah 776.926 orang (20,75%), Kabupaten Kulon Progo sejumlah 444.994 orang (11,89%) dan Kota Yogyakarta dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu sejumlah 415.605 orang (11,10%).

Tabel Jumlah Penduduk DIY Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2024

KODE	WILAYAH	JUMLAH	%
3401	KAB. KULON PROGO	444.994	11,89
3402	KAB. BANTUL	980.269	26,19
3403	KAB. GUNUNGKIDUL	776.926	20,75
3404	KAB. SLEMAN	1.125.571	30,07
3471	KOTA YOGYAKARTA	415.605	11,10
3400	DIY	3.743.365	100,00

Sumber: Data Konsolidasi Bersih Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri per 31 Desember 2024 (Semester 2 Tahun 2024) dikompilasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil DIY

Gambar Grafik Persebaran Jumlah Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2024



Sumber: Data Konsolidasi Bersih Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri per 31 Desember 2024 (diolah)

Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas satu kota dan empat kabupaten dengan 14 Kemantren (setingkat kecamatan di kota) dan 64 kapanewon (setingkat kecamatan di kabupaten) serta 438 Kalurahan/Kelurahan. Berdasarkan Pergub DIY 25/2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, masing-masing kabupaten telah menerapkan perubahan nomenklatur kelembagaan kecamatan menjadi kemantren/kapanewon dan desa menjadi kalurahan sejak tahun 2021 secara penuh sebagaimana tersebut di dalam tabel sebagai berikut:

Tabel Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Kapanewon/Kemantren (Setingkat Kecamatan)	Kalurahan (Setingkat Desa)	Kelurahan
1	Kulon Progo	12	87	1
2	Bantul	17	75	-
3	Gunungkidul	18	144	-
4	Sleman	17	86	-
5	Kota Yogyakarta	14	-	45
	DIY	78	392	46

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2024

A. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang

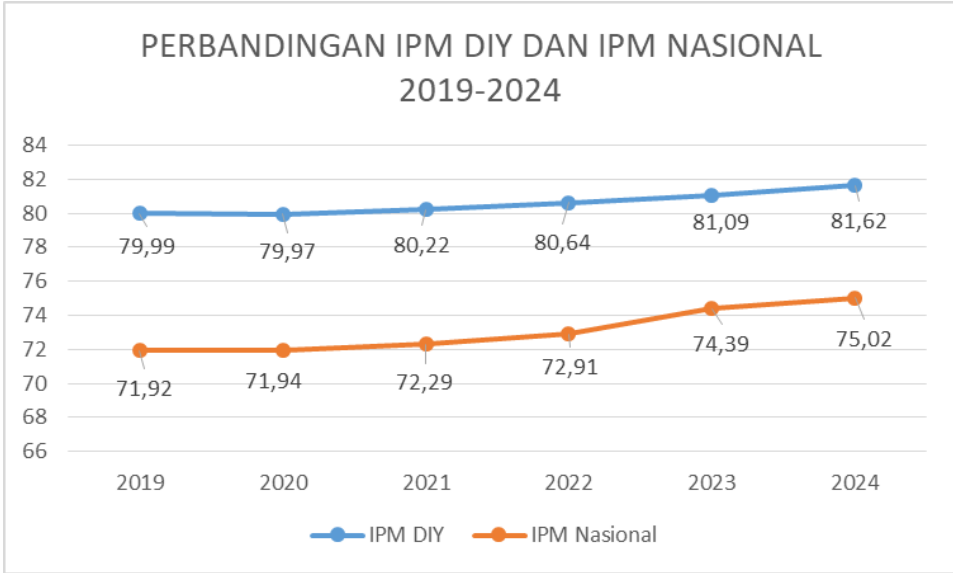
diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian kinerja makro Pemda DIY pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel Indikator Kinerja Makro

NO	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1 (2023)	Capaian Kinerja Tahun N (2024)	Perubahan (%)	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Pembangunan Manusia	81,09	81,62	$\frac{(81,62-81,09)}{81,09} \times 100\% = 0,65$	Nilai Positif menunjukkan perbaikan kinerja dari tahun 2023
2	Angka Kemiskinan	11,04%	10,40%	$\frac{(10,40-11,04)}{11,04} \times 100\% = -5,80\%$	Nilai negatif menunjukkan perbaikan kinerja dari tahun 2023
3	Angka Pengangguran	3,69%	3,48%	$\frac{(3,48-3,69)}{3,69} \times 100\% = -5,69\%$	Nilai negatif menunjukkan perbaikan kinerja dari tahun 2023
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,07	5,03	$\frac{(5,03-5,07)}{5,07} \times 100\% = -0,79\%$	Nilai Negatif menunjukkan penurunan kinerja dari tahun 2023
5	Pendapatan Per Kapita	48,54 juta rupiah	51,47 juta rupiah	$\frac{(51,60 \text{ Juta Rupiah} - 48,54 \text{ Juta Rupiah})}{48,60 \text{ Juta Rupiah}} \times 100\% = 6,03\%$	Nilai Positif menunjukkan perbaikan kinerja dari tahun 2023
6	Ketimpangan Pendapatan	0,449	0,428	$\frac{0,428-0,449}{0,449} \times 100\% = -4,68$	Nilai negatif menunjukkan perbaikan kinerja dari tahun 2023

Sumber: BPS, 2025

1. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)



Sumber: BPS, 2025, diolah

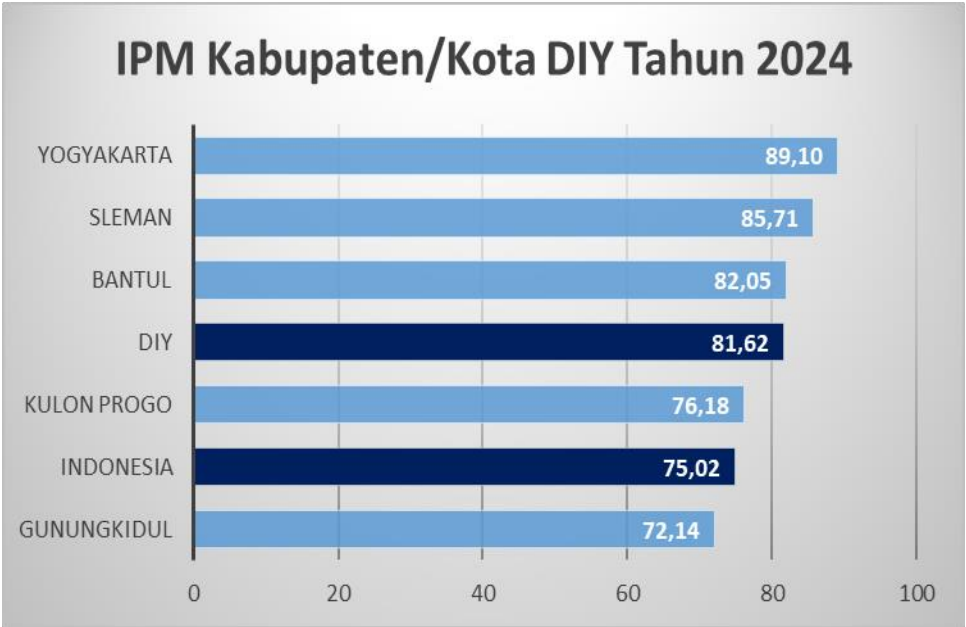
IPM DIY tahun 2024 sebesar 81,62, mengalami kenaikan 0,53 dibandingkan IPM tahun 2023. Sejak tahun 2021, status pembangunan manusia DIY sudah berada pada level “sangat tinggi”. Nilai IPM DIY padamasing-masing dimensi dari tahun 2021 hingga 2024 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel Jumlah Nilai Indeks Komponen IPM DIY 2021-2024

Komponen	2021	2022	2023	2024
Umur Harapan Hidup saat Lahir (Tahun)	75,04	75,08	75,18	75,36
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	15,64	15,65	15,66	15,70
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	9,64	9,75	9,83	9,92
Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (PPP) Rp000	14.111	14.482	14.924	15.361

Sumber: BPS, 2025

Pembangunan manusia tingkat kabupaten/kota selama tahun 2021-2024 mengindikasikan pencapaian yang sangat baik karena kabupaten/kota di DIY sudah berstatus “sangat tinggi” dan “tinggi”. Tahun 2024 IPM Kota Yogyakarta mencapai 89,10 dan tercatat paling tinggi di antara kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta. Capaian IPM tertinggi berikutnya adalah Kabupaten Sleman dan Bantul masing-masing sebesar 85,71 dan 82,05. Ketiga kabupaten/ kota tersebut menjadi daerah dengan status capaian pembangunan manusia yang “sangat tinggi”. Sementara IPM Kulon Progo dan Gunungkidul tercatat masing-masing sebesar 76,18 dan 72,14 dengan status capaian pembangunan manusia yang “tinggi”. Nilai IPM kabupaten/kota dibandingkan dengan IPM DIY dan nasional dapat dilihat pada gambar berikut:

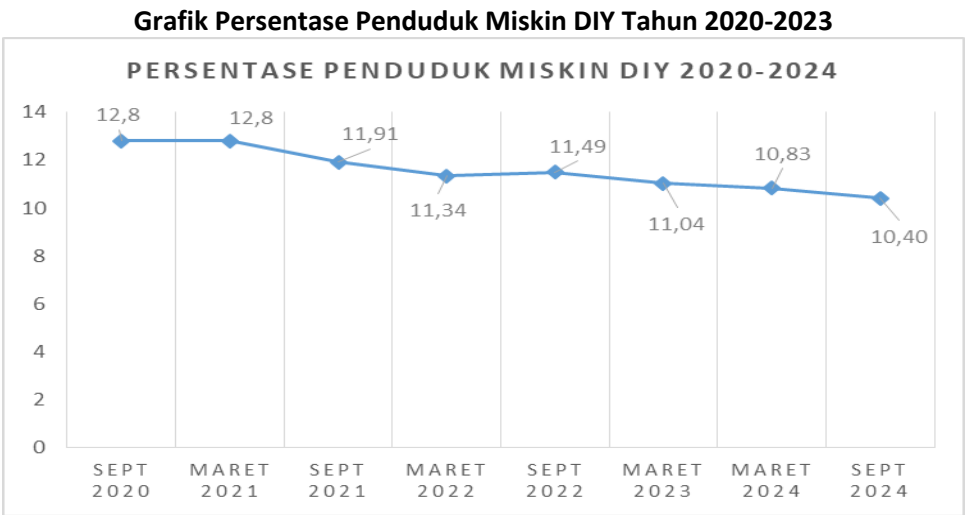


Sumber: BPS, 2025, diolah

IPM Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul berada di atas IPM DIY, sementara IPM Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul masih berada di bawah IPM DIY. Jika dibandingkan dengan IPM Nasional, hanya Kabupaten Gunungkidul yang memiliki nilai IPM di bawah IPM Nasional.

2. ANGKA KEMISKINAN

Angka kemiskinan menjadi salah satu indicator pengukuran kemiskinan, yang merupakan persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Pemda DIY terus melakukan berbagai program penanggulangan kemiskinan dengan memfokuskan penanganan kemiskinan pada lokasi prioritas. Pada tahun 2024, angka kemiskinan menurun dibandingkan tahun 2023, yaitu dari 11,04% menjadi 10,40%, yang berarti proporsi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan berkurang. Persentase penduduk miskin DIY dari tahun 2020 hingga 2023 dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: BPS, 2024

Selama periode tahun 2020 hingga 2024, persentase penduduk miskin atau angka kemiskinan di DIY terus mengalami penurunan. Pada tahun 2020, angka kemiskinan sebesar 12,80%, terus menurun hingga mencapai 10,40% pada September 2024. Angka tersebut merupakan angka yang terendah selama periode empat tahun terakhir. Trend penurunan ini diharapkan berlanjut pada periode berikutnya seiring dengan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan secara konsisten oleh Pemerintah Daerah DIY. Selain persentase angka kemiskinan yang terus menurun, jumlah penduduk miskin secara absolut juga terus menurun. Jumlah dan persentase penduduk miskin menurut daerah dapat dilihat pada table berikut:

Tabel Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin DIY Menurut Daerah
Maret 2023 – September 2024

Daerah	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin (%)
Perkotaan	Maret 2023	312,83	10,27
	Maret 2024	319,40	10,29
	September 2024	316,81	10,11
Perdesaan	Maret 2023	135,63	13,36
	Maret 2024	126,15	12,49
	September 2024	113,66	11,31
Total	Maret 2023	448,47	11,04
	Maret 2024	445,55	10,83
	September 2024	430,47	10,40

Sumber: BPS, 2024

Selama periode Maret 2023 hingga September 2024 jumlah penduduk miskin di DIY terus mengalami penurunan. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebanyak 448.470 orang, pada Maret 2024 sebanyak 445.550 orang, dan pada September 2024 sebanyak 430.470 orang. Berdasarkan analisis BPS, berikut faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan DIY selama periode Maret 2024 - September 2024:

1. Pertumbuhan ekonomi DIY pada triwulan III-2024 terhadap triwulan III-2023 sebesar 5,05% (y-on-y). Ekonomi DIY tumbuh positif dan merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Pulau Jawa
2. Inflasi selama September 2023-September 2024 sebesar 1,85% (y-on-y), sementara itu inflasi selama Maret 2023-Maret 2024 sebesar 2,95% (y-on-y)
3. Nilai Tukar Petani (NTP) pada September 2024 sebesar 104,76% dan menunjukkan adanya penurunan sebesar 2,59% dibandingkan NTP bulan Maret 2024 (107,35%)
4. Neraca perdagangan pada September 2024 mengalami surplus US\$29,3 juta, sementara itu nilai ekspor mencapai US\$46,18 juta dan nilai impor sebesar US\$16,86 juta
5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2024 sebesar 3,48% menunjukkan adanya penurunan sebesar 0,21% poin dibandingkan Agustus 2023 (3,69%). Penurunan TPT terjadi di perkotaan sebesar 0,22% poin dan di perdesaan sebesar 0,29% poin
6. Berbagai program bantuan sosial oleh pemerintah pusat dan program pengentasan kemiskinan oleh pemerintah DIY telah dikurirkan selama periode tahun 2024

3. ANGKA PENGANGGURAN

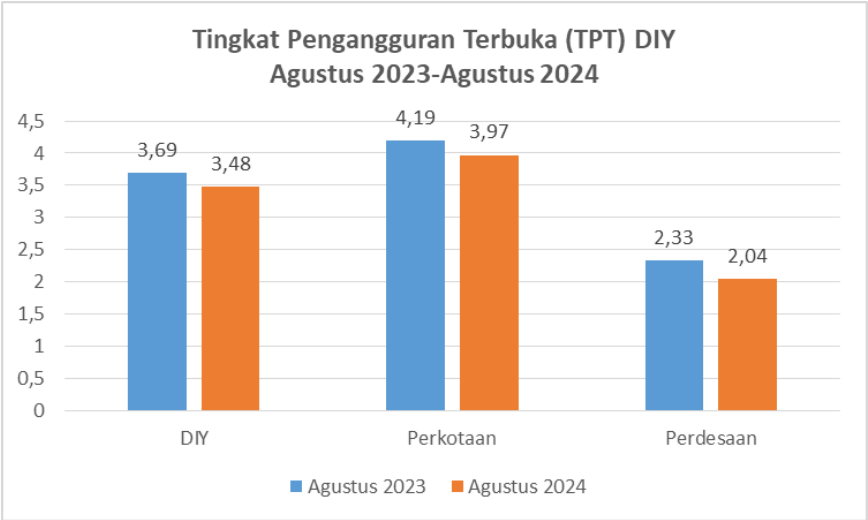
Angka pengangguran direfleksikan dari data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yang merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Pada Agustus 2024, TPT DIY adalah sebesar 3,48%, mengalami penurunan 0,21% poin dibanding TPT Agustus 2023 yang sebesar 3,69%. Jumlah angkatan kerja di DIY pada Agustus 2024 sebanyak 2,26 juta orang, mengalami kenaikan 39,74 ribu orang dibandingkan Agustus 2023. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 74,78%, mengalami kenaikan 0,70% poin dibandingkan Agustus 2023. Kondisi penduduk usia kerja dan angkatan kerja di DIY dari Agustus 2023 hingga Agustus 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2023-Agustus 2024

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2023 (ribu orang)	Agustus 2024 (ribu orang)
Penduduk usia kerja	2.998,93	3.024,06
Angkatan kerja	2.221,69	2.261,44
- Bekerja	2.139,71	2.182,77
- Pengangguran	81,98	78,67
- Bukan angkatan kerja	777,23	762,62

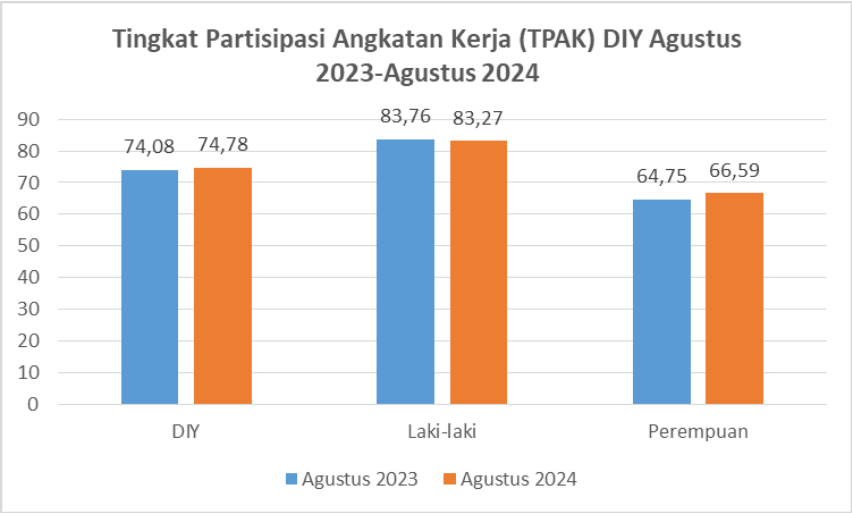
Sumber: BPS, 2024

Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DIY Agustus 2023 hingga Agustus 2024 dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: BPS, 2024

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DIY Agustus 2024 mengalami penurunan 0,21% poin dibandingkan TPT DIY Agustus 2023. Penurunan TPT terjadi baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Di daerah perkotaan, TPT mengalami penurunan 0,22% poin, dari 4,19% menjadi 3,97%. Sementara, TPT di perdesaan mengalami penurunan sebesar 0,29% poin, dari 2,33% menjadi 2,04%. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) DIY Agustus 2023 hingga Agustus 2024 dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: BPS, 2024

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK DIY pada Agustus 2024 sebesar 74,78%, mengalami peningkatan sebesar 0,70% poin jika dibandingkan Agustus 2023.

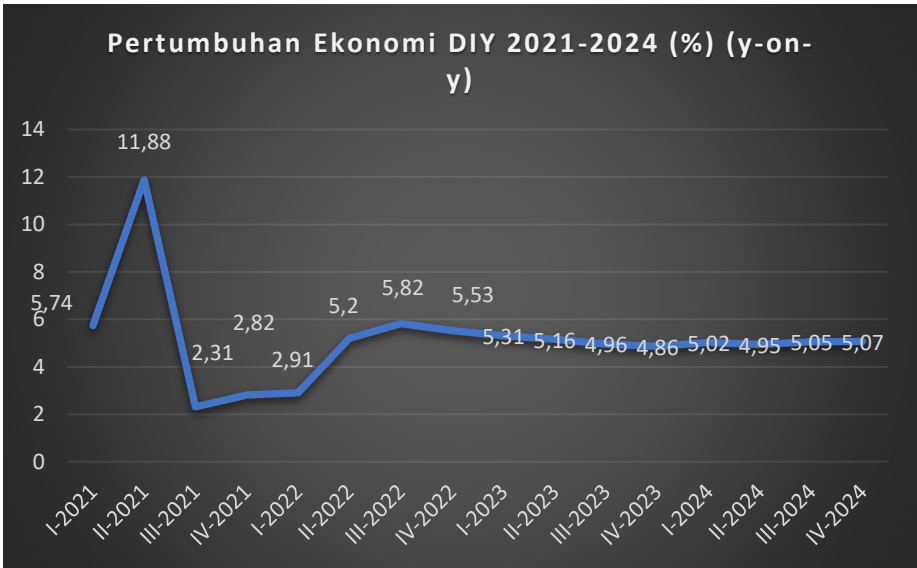
4. PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi DIY pada tahun 2024 sebesar 5,03% (c-to-c). Dibandingkan tahun 2023, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 lebih kecil 0,04% poin. Perekonomian DIY pada triwulan IV-2024 terhadap triwulan IV-2023 tumbuh sebesar 5,07% (y-on-y), dan terhadap triwulan III-2024 tumbuh sebesar 2,92% (q-to-q). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DIY atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 mencapai Rp.193.514.560 juta, dan atas dasar harga konstan mencapai Rp.124.590.449 juta. PDRB DIY atas dasar harga konstan dan harga berlaku pada tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada table berikut:

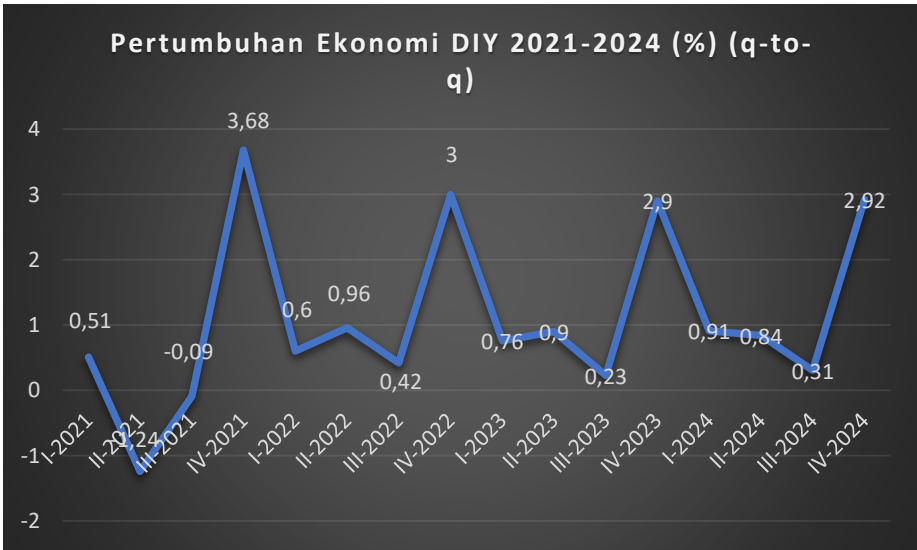
Tabel Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2023 dan 2024

PDRB	TW I (juta rupiah)	TW II (juta rupiah)	TW III (juta rupiah)	TW IV (juta rupiah)
PDRB ADHB 2023	44.324.449	44.835.267	44.931.944	46.595.373
PDRB ADHB 2024	47.900.528	48.496.843	48.114.991	49.747.137
PDRB ADHK 2023	29.209.247	29.473.144	29.542.668	30.397.929
PDRB ADHK 2024	30.680.710	30.937.077	31.033.267	31.939.395

Sumber: BPS, 2025

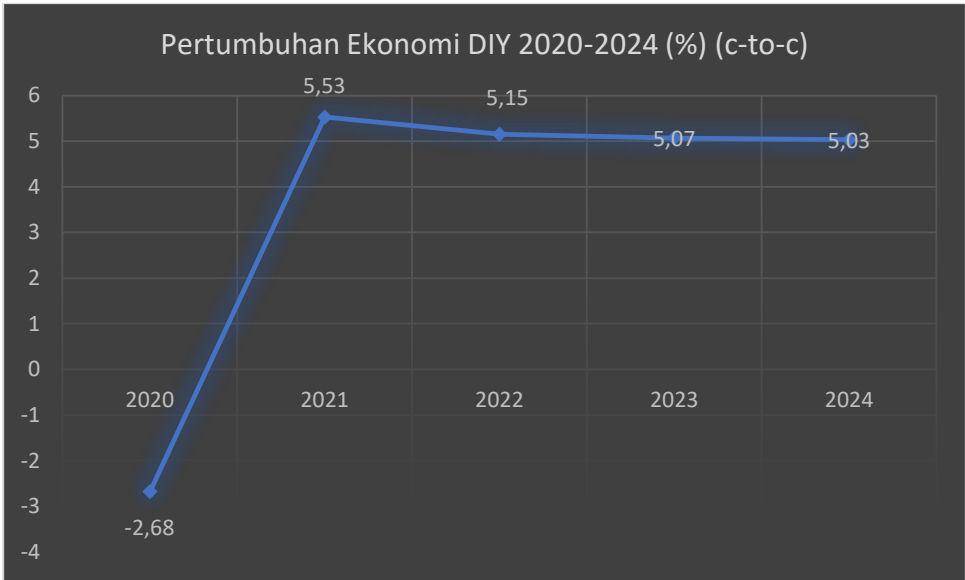


Sumber: BPS, 2025



Sumber: BPS, 2025

Dari data pertumbuhan ekonomi DIY dari 2021 hingga 2024 baik secara (y-on-y) maupun (q-to-q) dapat terlihat bahwa dinamika kinerja perekonomian DIY cukup stabil setelah tahun 2022. Pertumbuhan rata-rata secara (y-on-y) sebesar 5,16%, dan pertumbuhan rata-rata secara (q-to-q) sebesar 1,1%. Hal ini juga ditunjukkan oleh data pertumbuhan ekonomi secara kumulatif (c-to-c). Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi DIY dari tahun 2021 hingga tahun 2024 dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: BPS, 2025

Dari data pertumbuhan ekonomi *cumulative to cumulative* (c-to-c), ekonomi DIY mulai tumbuh stabil setelah tahun 2021, setelah mengalami kontraksi pertumbuhan pada tahun 2020 yaitu sebesar -2,68. Pada tahun 2021 ekonomi DIY tumbuh sebesar 5,53%, kemudian menurun menjadi 5,15% pada tahun 2022, 5,07% pada tahun 2023 dan 5,03% pada tahun 2024. Meskipun mengalami penurunan, namun besarnya tidak terlalu signifikan, dan masih tumbuh di atas 5% dalam empat tahun terakhir.

5. PENDAPATAN PER KAPITA

Produk Domestik regional Bruto (PDRB) DIY Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun 2024 sebesar Rp.193.514.560 juta, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DIY Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2024 sebesar Rp.124.590.449 juta. PDRB per kapita sesuai rilis BPS pada tahun 2024 sebesar Rp.51,47 juta. Nilai pendapatan per kapita dihitung menggunakan PDRB ADHB. PDRB DIY berdasarkan pengeluaran dapat dilihat pada tabel berikut:

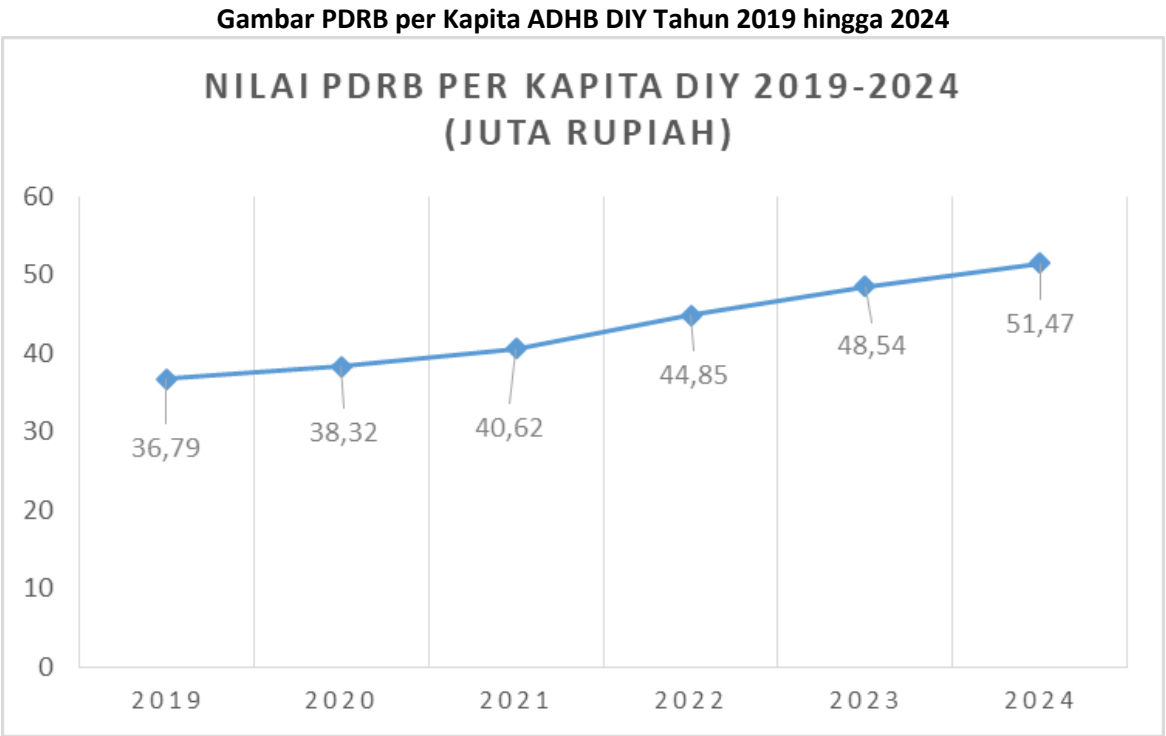
Tabel Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Pengeluaran Tahun 2023-2024

Komponen	2023		2024		Laju pertumbuhan
	PDRB ADHB (juta rupiah)	PDRB ADHK (juta rupiah)	PDRB ADHB (juta rupiah)	PDRB ADHK (juta rupiah)	
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	111.847.122	63.654.109	119.754.936	66.606.149	4,64
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	5.465.488	3.135.978	6.330.508	3.482.814	11,06
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	25.582.648	14.287.759	28.200.606	15.158.085	6,09
Pembentukan Modal tetap Bruto	59.938.746	31.709.055	66.614.650	34.215.014	7,90
Perubahan Inventori	1.734.039	1.202.099	1.855.069	1.232.934	-
Ekspor Barang dan Jasa	92.037.863	54.263.402	98.918.399	56.195.016	3,63

Impor Barang dan Jasa	115.915.954	49.625.559	128.159.610	52.299.563	5,46
PDRB	180.689.953	118.626.843	193.514.560	124.590.449	5,03

Sumber: BPS, 2025

PDRB per kapita DIY (Atas Dasar Harga Berlaku/ADHB) pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp.2,93 juta jika dibandingkan tahun 2023, yaitu dari Rp48,54 juta menjadi Rp.51,47 juta. PDRB per kapita DIY tahun 2019 hingga 2024 dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: BPS, 2025, diolah

6. KETIMPANGAN PENDAPATAN (INDEKS GINI)

Ketimpangan pendapatan diukur menggunakan rasio gini. Rasio gini berkisar antara nol dan satu. Nilai rasio gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio gini DIY pada September 2024 sebesar 0,428, mengalami penurunan jika dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 0,435. Rasio gini DIY pada tahun 2021 hingga 2024 dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: BPS, 2025, diolah

Pada September 2024, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk DIY yang diukur dengan menggunakan indikator rasio gini sebesar 0,429. Angka ini turun 0,007 poin jika dibandingkan dengan Maret 2024 yang besarnya 0,435, dan jika dibandingkan dengan rasio gini Maret 2023 terdapat penurunan sebesar 0,021 poin.distribusi pengeluaran penduduk DIY Maret 2023 hingga September 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Distribusi Pengeluaran Penduduk DIY Maret 2023-September 2024 (%)

Daerah	Tahun	Penduduk 40% Terbawah	Penduduk 40% Menengah	Penduduk 20% Teratas
Perkotaan	Maret 2023	15,21	31,43	53,36
	Maret 2024	15,77	32,26	51,97
	Sept 2024	16,46	32,03	51,51
Perdesaan	Maret 2023	19,76	34,59	45,65
	Maret 2024	20,06	35,50	44,44
	Sept 2024	19,84	35,66	44,50
Total	Maret 2023	15,58	31,68	52,74
	Maret 2024	16,05	32,62	51,33
	Sept 2024	16,48	32,44	51,08

Sumber: BPS 2024

Secara keseluruhan terjadi peningkatan kontribusi pengeluaran pada kelompok penduduk 40% terbawah dan kelompok penduduk 40% teratas.

B. RINGKASAN CAPAIAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1. URUSAN PENDIDIKAN

1.1. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan pendidikan yang diperoleh oleh Pemda DIY pada tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel Realisasi Kinerja Urusan Pendidikan di DIY Tahun 2023-2024

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	97,69%	97,71%
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	90,42%	83,89%* (Capaian Tahun 2024 tidak memasukkan siswa inklusi di sekolah umum)

Sumber: Dinas Pendidikan DIY, 2025 (diolah)

1.2. Realisasi Belanja Urusan Pendidikan

Realisasi belanja Urusan Pendidikan di Pemda DIY Tahun 2024 sebesar Rp1.573.735.221.597,00 (95,80%) dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut:

- 1) Program Pengelolaan Pendidikan, dengan kegiatan:
 - a. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
 - b. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
 - c. Pengelolaan Pendidikan Khusus
- 2) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dengan kegiatan:
 - a. Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi
 - b. Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
- 3) Program Pengendalian Perizinan Pendidikan, dengan kegiatan:
 - a. Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
 - b. Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

Selain itu penyelenggaraan urusan pendidikan juga didukung melalui dana keitimewaan yaitu Urusan Kebudayaan meliputi Pendidikan Berbasis Budaya, Pembinaan Muatan Lokal dan Sarpras Pendidikan

1.3. Permasalahan Yang Dihadapi

Angka Putus Sekolah penduduk usia 16-18 tahun di DIY masih melebihi target yang ditetapkan. Capaian Angka Putus Sekolah adalah sebesar 0,28% sedangkan target yang ditetapkan adalah 0,20%.

2. URUSAN KESEHATAN

2.1. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan kesehatan yang diperoleh oleh Pemda DIY pada tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel Realisasi Kinerja Urusan Kesehatan di DIY Tahun 2023-2024

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
1	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	2,32%	2,17%
2	Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi	100%	100%
3	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100%	100%
4	Persentase pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	tidak ada KLB	100%

Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2025 (diolah)

2.2. Realisasi Belanja Urusan Kesehatan

Anggaran belanja Urusan Kesehatan di Pemda DIY Tahun 2024 yang direalisasikan melalui Dinas Kesehatan dengan serapan sebesar Rp263.710.832.509,35 (86,60%), melalui RS Jiwa Grhasia sebesar Rp96.179.241.742,00 (87,96%), dan melalui RS Respira sebesar Rp65.667.649.404 (83.83) dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut:

- 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan kegiatan:
 - a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi;
 - b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi;
 - c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi;
 - d. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi.
- 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, dengan kegiatan:
 - a. Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi;
 - b. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi.
- 3) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, dengan kegiatan:
 - a. Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK);
 - b. Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT).
- 4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, dengan kegiatanAdvokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi.
- 5) Selain itu penyelenggaraan Urusan Kesehatan juga didukung melalui dana keistimewaan yaitu Urusan Kebudayaan yaitu Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional

2.3. Permasalahan Yang Dihadapi

Permasalahan yang dihadapi untuk urusan Kesehatan di Pemda DIY Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Pencatatan dan pelaporan terkait pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana dan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) belum optimal;
- 2) Masih tingginya prevalensi Penyakit Tidak Menular (PTM) dan Gangguan Jiwa di DIY;
- 3) Masih terjadinya kasus Penyakit Menular dan kasus kematian akibat penyakit menular di DIY;
- 4) Tahun 2024 Prevalensi Stunting di DIY mencapai angka 10,7%;
- 5) Jumlah kasus kematian ibu masih fluktuatif. Tahun 2023 kematian Ibu sebanyak 22 kasus, lalu pada tahun 2024 tercatat 25 kasus kematian Ibu;
- 6) Kasus kematian bayi masih tinggi. Pada tahun 2022 kematian bayi sebanyak 303 kasus, dan pada tahun 2023 turun menjadi 274 kasus. Tahun 2024 mencapai 286 kasus;
- 7) Prevalensi balita gizi kurang atau Kurang Energi Protein (KEP) di DIY cenderung fluktuatif. Pada tahun 2024 Prevalensi balita Gizi kurang atau Kurang Energi Protein 11,9%;
- 8) Ketersediaan tenaga kesehatan baik di puskesmas maupun rumah sakit di DIY pada umumnya sudah baik, namun bila dilihat dari persebarannya masih belum merata antar kabupaten/kota di DIY terutama untuk Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunung Kidul.

3. URUSAN PEKERJAAN UMUM

3.1. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan pekerjaan umum yang diperoleh oleh Pemda DIY pada tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel Realisasi Kinerja Urusan Pekerjaan Umum di DIY Tahun 2023-2024

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
1	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	Tidak ada wilayah sungai kewenangan provinsi (Permen PUPR Nomor 4/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, di DIY tidak terdapat Wilayah Sungai Lintas Kabupaten / kota, yang ada adalah Wilayah Sungai Lintas Provinsi yang menjadi kewenangan Pusat)	Tidak ada wilayah sungai kewenangan provinsi (Permen PUPR Nomor 4/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, di DIY tidak terdapat Wilayah Sungai Lintas Kabupaten / kota, yang ada adalah Wilayah Sungai Lintas Provinsi yang menjadi kewenangan Pusat)
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi	Tidak ada wilayah sungai kewenangan provinsi (Permen PUPR Nomor 4/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, di DIY tidak terdapat Wilayah Sungai Lintas Kabupaten / kota, yang ada adalah Wilayah Sungai Lintas Provinsi yang menjadi kewenangan Pusat)	Tidak ada wilayah sungai kewenangan provinsi (Permen PUPR Nomor 4/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, di DIY tidak terdapat Wilayah Sungai Lintas Kabupaten / kota, yang ada adalah Wilayah Sungai Lintas Provinsi yang menjadi kewenangan Pusat)
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	100%	100%
4	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/ kota	20,98%	100%
5	Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	34,98%	37,86%
6	Rasio kemantapan jalan	70,18 %	68,04
7	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	68,08%	79,21%

Sumber: Dinas PUESDM DIY, 2025 (diolah)

3.2. Realisasi Belanja Urusan Pekerjaan Umum

Anggaran belanja Urusan Pekerjaan Umum di Pemda DIY Tahun 2023 sebesar Rp330.674.290.026,00 dengan realisasi sebesar Rp319.556.892.635 (96,64%) dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut:

- 1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), dengan kegiatan:
 - a. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, dengan kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota;

- 3) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional, dengan kegiatan: Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional;
- 4) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, dengan kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional;
- 5) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, dengan kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/kota dan Kawasan Strategis Provinsi;
- 6) Program Penyelenggaraan Jalan, dengan kegiatan: Penyelenggaraan Jalan Provinsi
- 7) Program Pengembangan Jasa Konstruksi, dengan kegiatan:
 - a. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi;
 - b. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi;
- 8) Selain itu urusan Pekerjaan Umum juga didukung dengan Dana Keistimewaan melalui Program Urusan Tata Ruang yaitu Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten dan Urusan Kebudayaan yaitu Sarpras Keistimewaan.

3.3. Permasalahan Yang Dihadapi

Permasalahan yang dihadapi untuk urusan Pekerjaan Umum di Pemda DIY Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Masih tingginya kebocoran di masing-masing PDAM;
- 2) Pengelolaan SPAMDES akibat Sistem yang tidak berjalan akibat sistem yang rusak, tidak adanya pengelola, atau keterbatasan air baku akibat musim kemarau;
- 3) Pendanaan untuk penyelenggaraan air minum di kabupaten/kota terkait investasi hilir berupa jaringan servis dan SR masih terbatas;
- 4) Untuk peningkatan akses sanitasi layak masih ada beberapa masyarakat yang belum menyadari untuk membangun tangki septik yang sesuai dengan standar teknis;
- 5) Untuk meningkatkan akses aman masih terdapat keterbatasan sebagai berikut:
 - terbatasnya anggaran kabupaten kota dalam pembiayaan penambahan sambungan rumah IPAL Sewon;
 - Masih kurangnya Sarana dan Prasarana (mobil sedot tinja kurang);
 - Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul belum mempunyai IPLT serta IPLT Banyuroto Kulon Progo belum optimal;
 - kesadaran masyarakat dalam menguras tangki septiknya;
- 6) Kondisi Cuasa khususnya Curah hujan yang tinggi menyebabkan Beberapa titik jalan Provinsi mengalami kelongsoran.
- 7) Meningkatnya beban volume lalu lintas yang melintasi ruas jalan provinsi - Dilalui kendaraan pengangkut material tambang sehingga membuat beberapa jalan provinsi lebih cepat mengalami kerusakan;
- 8) Tidak adanya Lokasi penyimpanan Material Galian pada Lokasi Kegiatan Fisik;
- 9) Peningkatan penyediaan infrastruktur sumber daya air masih didukung dari pembangunan baru infrastruktur sumur bor air tanah dalam, sedangkan infrastruktur sumber daya air lainnya bersifat peningkatan dan rehabilitasi;
- 10) Pembangunan infrastruktur sumur bor air tanah dalam didasarkan pada penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga di daerah kekeringan yang memiliki kerawanan akses air baku dari sumber-sumber air permukaan maupun air tanah dangkal. Daerah tersebut memiliki tipikal geografi pada permukiman di kaki pegunungan dengan kondisi batuan yang keras serta berongga sehingga menyebabkan tingkat keberhasilan mendapatkan air tanah dalam sangat bervariasi. Beberapa pekerjaan sumur bor memerlukan waktu yang melebihi rencana akibat kondisi dan situasi batuan dan akuifer;
- 11) Perlunya peningkatan Server dari Web Klinik Konstruksi dikarenakan server merupakan server bersama dari Dinas Kominfo, sehingga server terkadang mengalami gangguan;
- 12) Perlu penambahan jumlah alat pengujian, sehingga proses pengujian lebih efisien.

4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

4.1. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang diperoleh oleh Pemda DIY pada tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel Realisasi Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di DIY
Tahun 2023-2024

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
1	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Tidak ada bencana provinsi	Tidak ada bencana provinsi
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100 %	100 %
3	Persentase Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani	8,19 %	50,52%
4	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	50,66 %	52,59%

Sumber: Dinas PUESDM DIY, 2025 (diolah)

4.2. Realisasi Belanja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Anggaran belanja urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Pemda DIY Tahun 2024 sebesar Rp105.230.447.500,00 dengan realisasi sebesar Rp95.184.155.374,00 (93,66%) dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut:

- 1) Program Pengembangan Perumahan, dengan kegiatan:
 - a. Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi;
 - b. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi;
 - c. Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana.
- 2) Program Kawasan Permukiman, dengan kegiatan:
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - b. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan Kesehatan 15 (Lima Belas) Ha.
- 3) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), dengan kegiatan:
 - a. Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman;
 - b. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman.

4.3. Permasalahan Yang Dihadapi

Permasalahan yang dihadapi untuk urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Pemda DIY Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Belum adanya insentif/skema untuk mengembangkan hunian Vertikal di perkotaan vertikal untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) maupun masyarakat miskin;
- 2) Harga lahan yang mahal untuk pembangunan perumahan MBR dan masyarakat miskin;
- 3) Pendataan RTLH yang kurang terpadu, terintegrasi, dan tersinergi antara Pusat (Balai), Provinsi, Kabupaten / Kota, serta swasta yang menyebabkan sulitnya dilakukan pendataan yang akurat dan valid;
- 4) Peningkatan kualitas pada setiap kriteria kawasan kumuh di Kab/Kota tidak terintegrasi sehingga menyebabkan tidak tuntasnya penanganan di suatu lokasi;
- 5) Pengukuran keberhasilan pembangunan PSU Permukiman di kaluraha/kelurahan belum dapat diukur dengan baik.

5. URUSAN TRAMTIBUMLINMAS

5.1. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja Urusan Tramtibumlinmas yang diperoleh oleh Pemda DIY pada tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel Realisasi Kinerja Urusan Tramtibumlinmas di DIY Tahun 2023-2024

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	100%

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
3	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	100%	100%
4	Persentase penanganan pra bencana	100 %	100 %
5	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100 %	100 %

Sumber: Satpol PP DIY, 2025 (diolah)

5.1. Realisasi Belanja Urusan Tramtibumlimas

Realisasi belanja Pelayanan Tramtibumlinmas di Satpol PP DIY Tahun 2024 sebesar Rp85.353.854.838,00 (97,77%) dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut:

- 1) Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
 - a. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan;
 - b. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia;
 - c. Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan;
 - d. Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - e. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
 - f. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
- 2) Selain itu urusan Pekerjaan Umum juga didukung dengan Dana Keistimewaan melalui Program Urusan Pertanahan dan Urusan Kebudayaan meliputi Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa, Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya, Pembinaan Jagawarga dan Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya.

Realisasi belanja urusan Bencana dan Kebakaran di BPBD DIY Tahun 2024 sebesar Rp17.054.814.613 (94,77%) dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut:

- 1) Program Penanggulangan Bencana
 - a. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana);
 - b. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi;
 - c. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana;
 - d. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
 - e. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana;
 - f. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana;
 - g. Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana;
 - h. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;
 - i. Penanganan Pasca Bencana Provinsi;
 - j. Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah.
- 2) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran: Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran;
- 3) Selain itu urusan Bencana juga didukung dengan Dana Keistimewaan melalui Program Urusan Kebudayaan meliputi Kegiatan Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia dan Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya.

5.2. Permasalahan Yang Dihadapi

Permasalahan yang dihadapi untuk urusan sosial di Pemda DIY Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan / atau tanpa berizin;
- 2) Pelanggaran Perda dan Perkada yang makin marak dilakukan oleh masyarakat lokal maupun warga pendatang yang berkunjung ke Daerah Istimewa Yogyakarta, diantaranya pemasangan spanduk / reklame tanpa berizin dan melintang di atas jalan sehingga membahayakan pengguna jalan, maraknya peredaran rokok ilegal tanpa cukai, dan peredaran minuman keras beralkohol yang tidak terkendali;
- 3) Kondisi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai destinasi wisata dan kota ramah wisata menyebabkan banyak wisatawan domestik maupun mancanegara yang suka memberi uang kepada anak jalanan,

- gelandangan atau pengemis seperti manusia silver dan pengamen akustik di setiap perempatan lampu merah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 4) Maraknya aktivitas penambangan liar di sungai, pesisir pantai, bukit, dan gunung / lereng gunung yang dilakukan tanpa berizin dan merusak lingkungan.

6. URUSAN SOSIAL

6.1. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan sosial yang diperoleh oleh Pemda DIY pada tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel Realisasi Kinerja Urusan Sosial di DIY Tahun 2023-2024

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100%	100%
2	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100%	100%
3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100%	100%
4	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100%	100%
5	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100%	100%

Sumber: Dinas Sosial DIY, 2025 (diolah)

6.2. Realisasi Belanja Urusan Sosial

Realisasi belanja urusan sosial di Pemda DIY Tahun 2024 sebesar Rp99.308.689.542,00 (96,06%) dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut:

- 1) Program Pemberdayaan Sosial, dengan kegiatan: Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi;
- 2) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, dengan kegiatan: Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal.
- 3) Program Rehabilitasi Sosial, dengan kegiatan:
 - a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti;
 - b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti;
 - c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti;
 - d. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti;
 - e. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti;
- 4) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, dengan kegiatan:
 - a. Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal;
 - b. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi.
- 5) Program Penanganan Bencana, dengan kegiatan: Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi;
- 6) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan: Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
- 7) Selain itu urusan Sosial juga didukung dengan Dana Keistimewaan melalui Program Urusan Kebudayaan dan Urusan Kelembagaan meliputi Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Penumbuhan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial Peningkatan Budaya Pemerintahan.

6.3. Permasalahan Yang Dihadapi

Permasalahan yang dihadapi untuk urusan sosial di Pemda DIY Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) DIY telah memasuki *Aging Population* atau struktur penduduk tua, tahun 2024 DIY telah menjadi Daerah dengan proporsi lanjut usia terbesar yaitu 16.28%. Tahun 2024 data PPKS lanjut usia menunjukkan jumlah 23.301 orang. Permasalahan lanjut usia miskin terkait pemenuhan kebutuhan dasar dan hidup layak;
- 2) Kemajuan teknologi dan informasi berakibat pada arus informasi yang sangat bebas di masyarakat. Banyak informasi terungguh berkaitan dengan permasalahan sosial yang kemudian menyudutkan peran Pemerintah. Permasalahan sosial seolah tidak tertangani atau lambat tertangani.

C. RINGKASAN CAPAIAN URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

1. URUSAN TENAGA KERJA

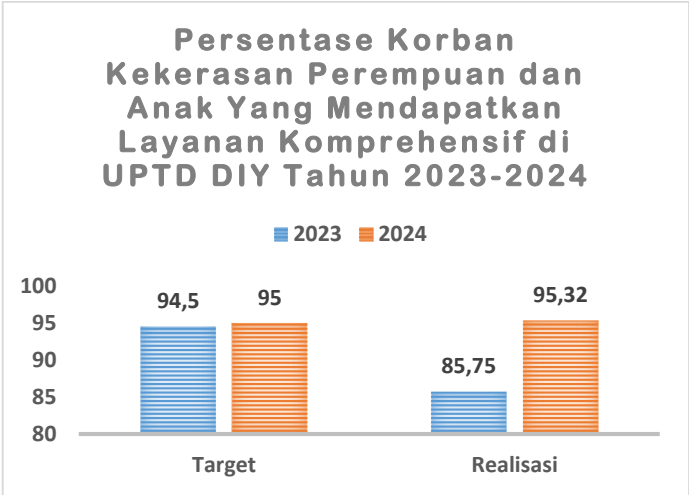
Tabel Target dan Realisasi Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Capaian 2023	2024			Target akhir RPJMD 2027	Capaian 2024 terhadap Target Akhir RPJMD 2027 (%)
				Target	Realisasi	Persentase		
1	Tingkat produktivitas DIY	Juta/ Tenaga Kerja	55,54	54,09	57,08	105,53	61,19	93,28
2	Persentase lulusan pelatihan yang ditempatkan	%	n/a	75	75	100	75	100,00
3	Persentase perusahaan dengan kategori produktivitas baik	%	n/a	65	68	104,62	80	85,00
4	Persentase penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja	%	n/a	67.5	87	128,89	75	116,00
5	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Perusahaan	n/a	2629	2630	100,04	2659	98,91
6	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Kerja dan Norma K3	Perusahaan	n/a	2748	2750	100,07	2808	97,93

Sumber: Dinas Nakertrans DIY, 2025

2. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Capaian kinerja urusan tenaga kerja yang diperoleh pada tahun 2024 berdasarkan indikator kinerja persentase Korban kekerasan Perempuan dan anak yang mendapatkan layanan komprehensif di UPTD dan P2TPA se-DIY adalah sebagai berikut:



3. URUSAN PANGAN

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan salah satu indikator penilaian konsumsi pangan secara kualitatif. Pola Pangan Harapan merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi berbagai kelompok pangan. Semakin tinggi skor PPH suatu wilayah menunjukkan konsumsi masyarakat di wilayah tersebut semakin beragam jenisnya dan semakin bergizi, hal ini mengindikasikan semakin tingginya kualitas konsumsi pangan masyarakat.



Tahun 2023-2024 menggunakan *Baseline* AKE 2.100 kkal/kapita/hari
Sumber data: BPS Provinsi DIY diolah oleh DPKP DIY, 2025

Penghitungan Skor PPH menggunakan data dasar dari SUSENAS BPS. Capaian indikator Skor PPH tahun 2024 sebesar 95,66. Dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 96,30, mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh turunnya proporsi konsumsi masyarakat pada beberapa golongan bahan pangan yaitu umbi-umbian, kacang-kacangan, dan gula. Penurunan skor PPH dapat terjadi akibat pengaruh penurunan daya beli masyarakat, kurangnya minat konsumsi, serta masih terbatasnya penyediaan bahan pangan tertentu di masyarakat.

4. URUSAN PERTANAHAN



Sumber: Dinas Pertanian dan Tata Ruang DIY, 2025 (diolah)

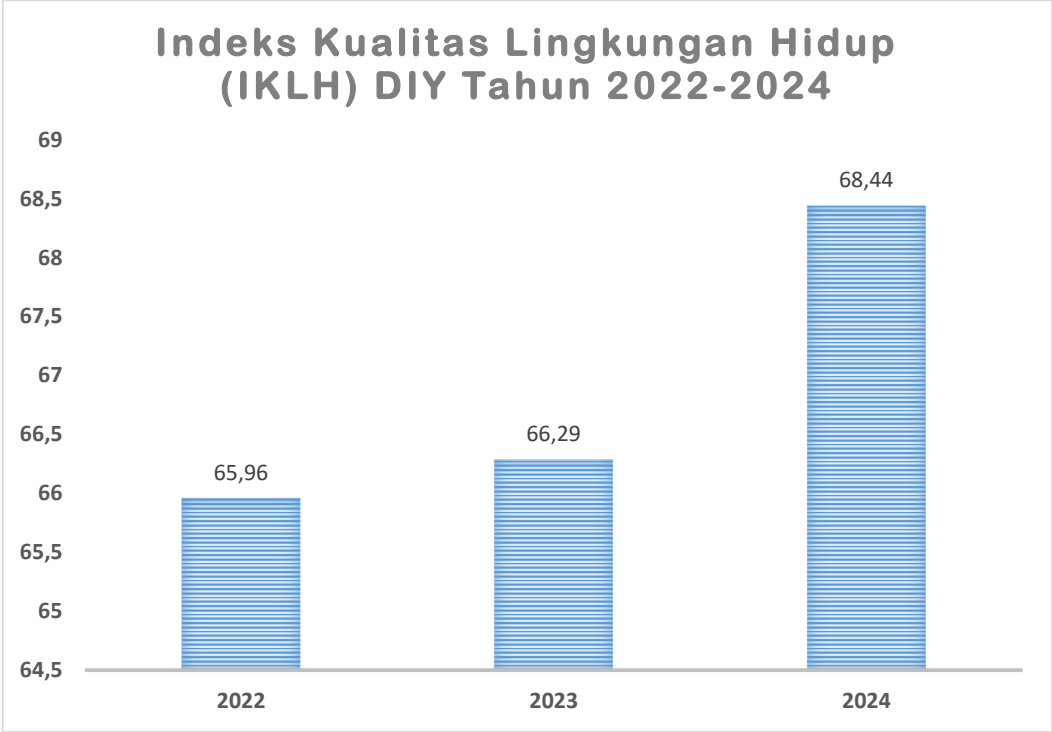
Tabel Data Ijin Penetapan Lokasi (IPL) Pengadaan Tanah di DIY Tahun 2024

NO	NO. SK IPL	TAHUN	TENTANG
1	254/KEP/2024	2024	Pembaruan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo Seksi 1 dan 2 di Daerah Istimewa Yogyakarta

NO	NO. SK IPL	TAHUN	TENTANG
2	459/KEP/2023	2024	Pembaruan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen di Daerah Istimewa Yogyakarta
3	479/KEP/2024	2024	Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir dan Pengaman Pantai Kawasan Yogyakarta International Airport di Kabupaten Kulon Progo

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 2025

5. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP



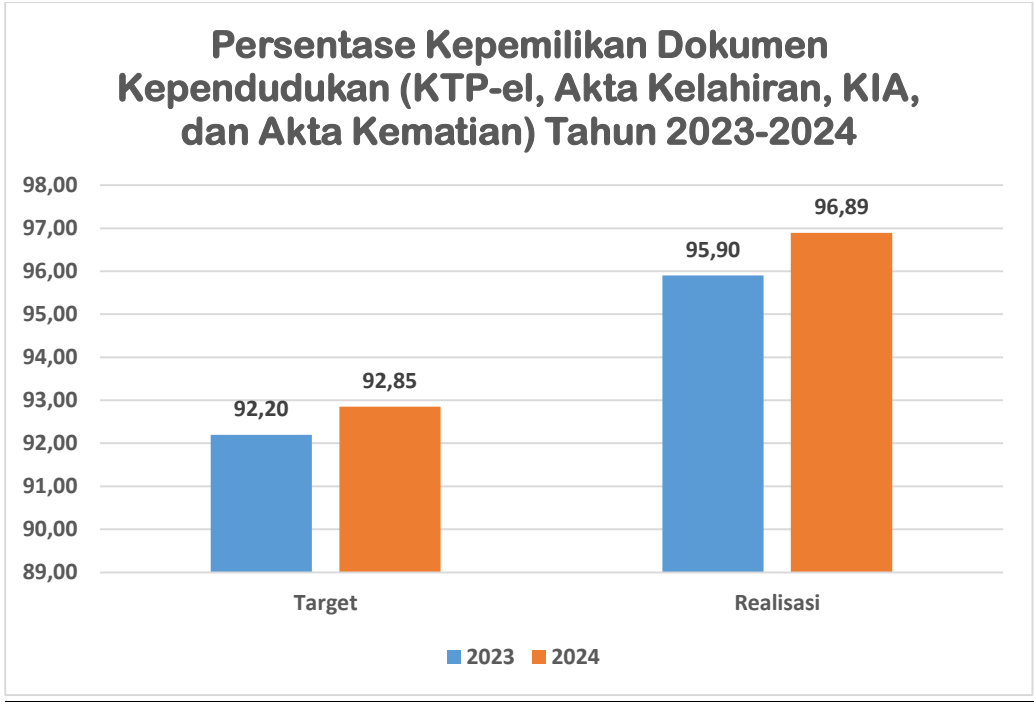
Tabel Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) DIY Tahun 2024

Komponen	Formula	Realisasi	Bobot
Indeks Kualitas Air	$\frac{\sum (\text{setiap kategori status mutu})}{\sum (\text{status mutu air})} * 100$	42,94	0,340
Indeks Kualitas Udara	$100 - [50/0.9 \times (I_{\text{eu}} - 0.1)]$	90,44	0,428
Indeks Kualitas Lahan	$IKL = 100 - ((84,3 - (TL \times 100)) \times 50/54,3)$	51,13	0,133
Indeks Kualitas Air Laut	$WQI = \sum Q_i W_i$	84,13	0,099
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup DIY	$(0,340 \times IKA) + (0,428 \times IKU) + (0,133 \times IKL) + (0,099 \times IKAL)$	68,44	1

Sumber: Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK Tahun 2024 (diolah)

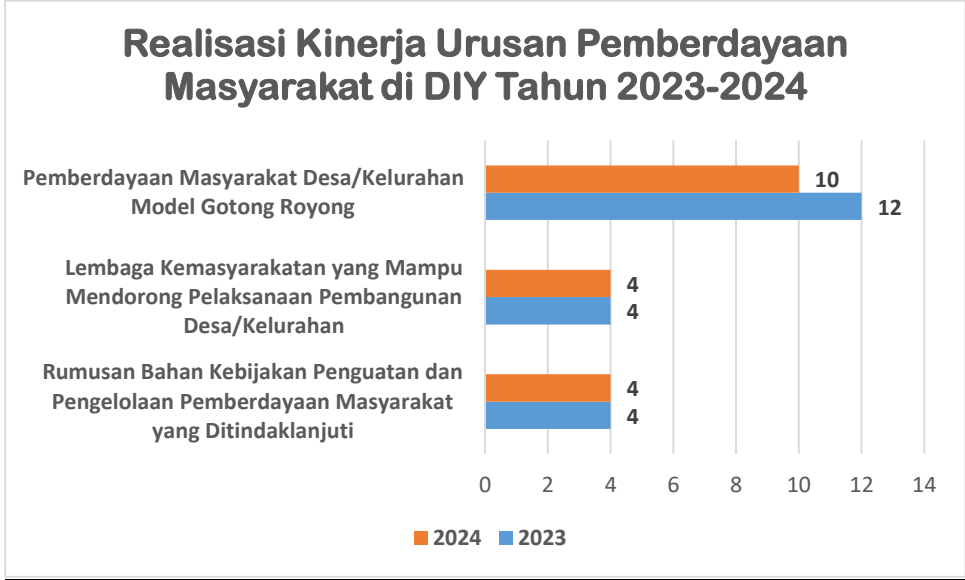
6. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Capaian kinerja urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang diperoleh pada tahun 2024 berdasarkan indikator persentase kepemilikan dokumen kependudukan (KTP-el, akta kelahiran, KIA, dan akta kematian) adalah sebagai berikut:



7. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Capaian kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang diperoleh pada tahun 2024 dengan sasaran meningkatnya keberdayaan organisasi/lembaga masyarakat dengan indikator jumlah lembaga kemasyarakatan yang mampu mendorong pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan pada tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: DPMKKPS DIY, 2025 (diolah)

Pembinaan Global Gotong Royong (G2R) *TetraPreneur* DIY Tahun 2024 dilakukan di Kalurahan sebagai berikut:

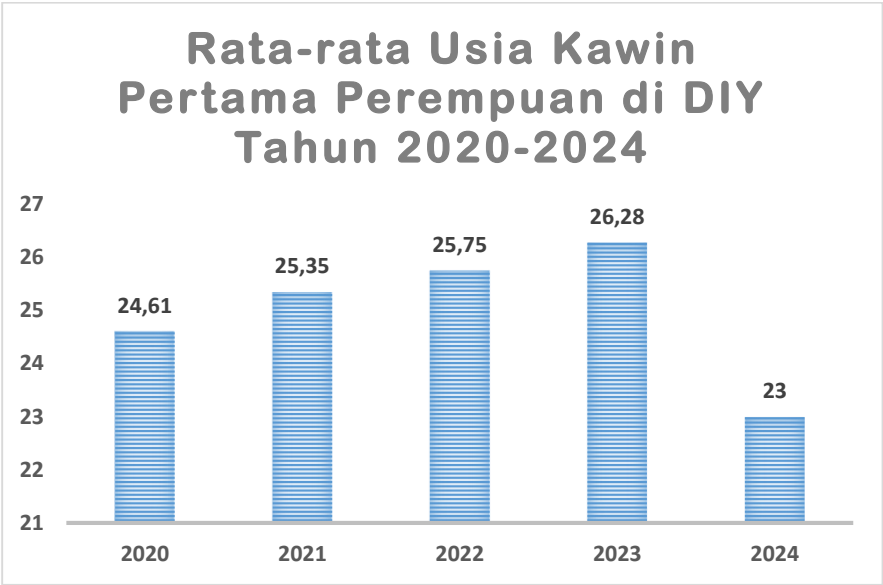
- 1) Kalurahan Kalirejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo;
- 2) Kalurahan Selopamioro, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Kulon Progo;
- 3) Kalurahan Srikayangan, Kapanewon Sentolo, Kulon Progo;
- 4) Kalurahan Sumberrejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman;

Kegiatan *Segoro Amarto* merupakan salah satu pemberdayaan masyarakat dikhususkan bagi masyarakat yang kurang mampu di wilayah Kota Yogyakarta. Beberapa anggota keluarga dikumpulkan untuk bersama-sama merumuskan kegiatan yang akan dilakukan bersama dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat. Setelah itu dilakukan pelatihan dan praktek yang langsung didampingi oleh para ahli yang berkompeten pada bidang yang telah disepakati oleh masyarakat. Adapun kegiatan *Segoro Amarto* telah dilaksanakan di:

- 1) Kelurahan Bausaran, Kemantren Dunerejan;
- 2) Kelurahan Klitren, Kemantren Gondokusuman;
- 3) Kelurahan Mantrijeron, Kemantren Mantrijeron;
- 4) Kelurahan Ngupasan, Kemantren Gondomanan;
- 5) Kelurahan Rejowinangun, Kemantren Kota Gede;

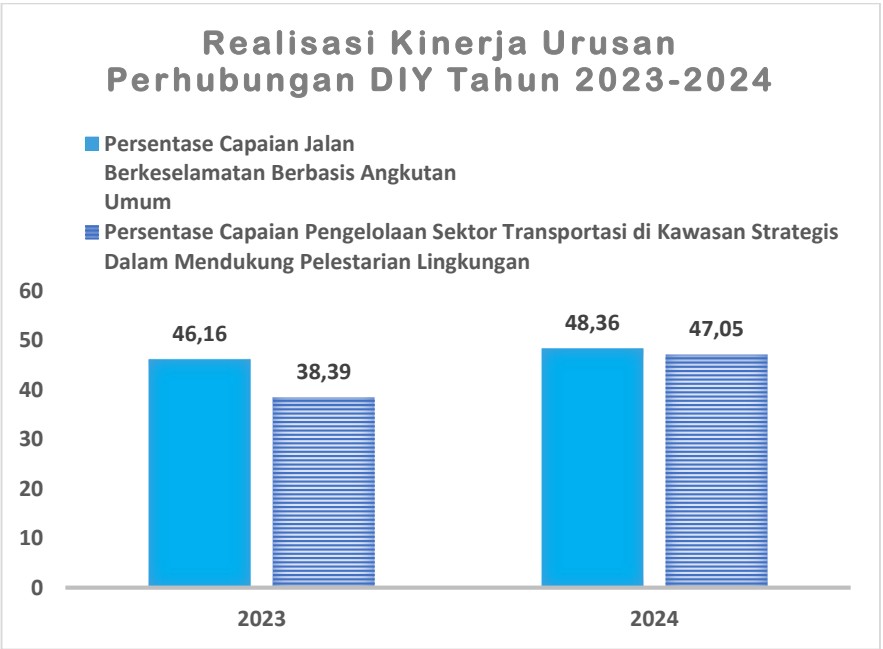
6) Kelurahan Semaki, Kemantren Umbulharjo.

8. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (KB)



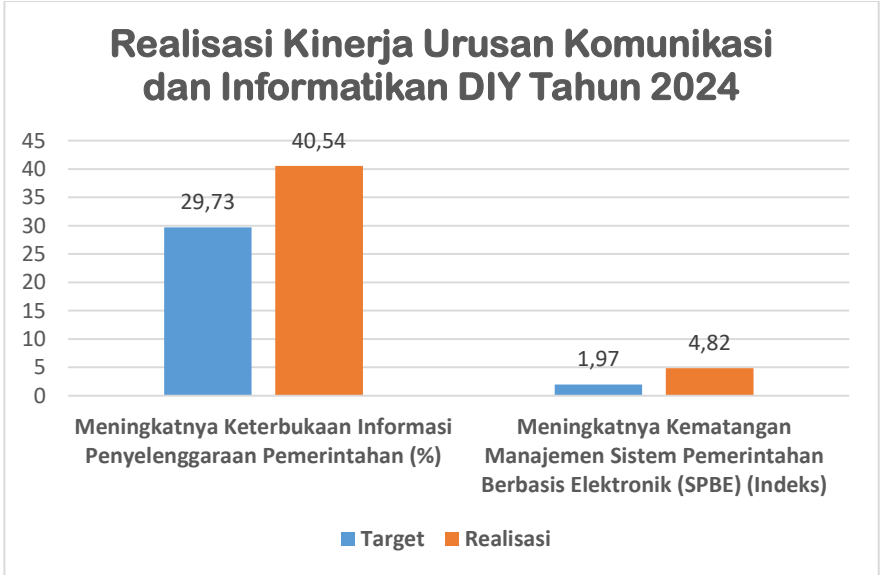
Sumber: DP3AP2 DIY, 2025 (diolah)

9. URUSAN PERHUBUNGAN



Sumber: Dinas Perhubungan DIY, 2024 (diolah)

10. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



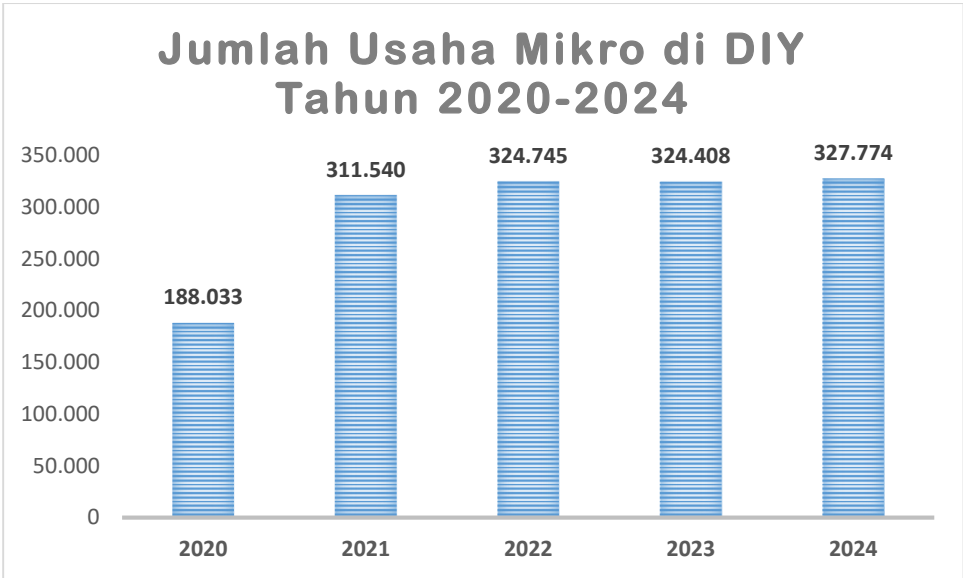
Sumber: Dinas Kominfo DIY, 2025 (diolah)

11. URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

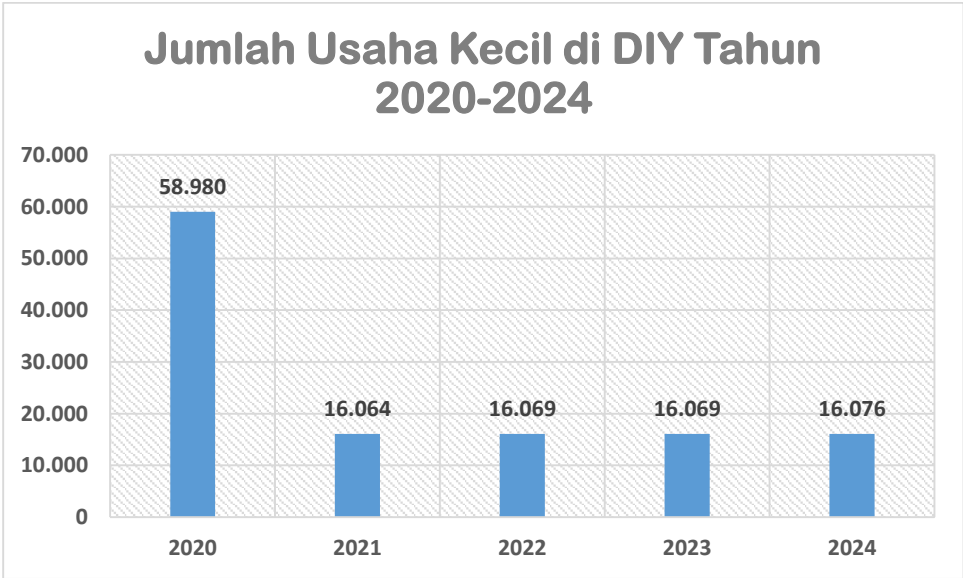
Tabel Perkembangan Jumlah Koperasi Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Koperasi Aktif	1.758	1.717	1.698	1.734	1.672
2	Koperasi Pasif	180	271	310	352	402
3	Modal Sendiri (Rp Juta)	1.595.511	1.630.287	1.587.752	2.020.705	2.011.159
4	Modal Luar (Rp Juta)	2.188.554	2.372.549	3.132.602	3.363.762	4.078.110
5	Volume Usaha (Rp Juta)	4.141.871	4.272.359	4.404.185	4.867.928	5.585.240
6	Koperasi Primer	1.728	1.950	1.972	2.049	2.036
7	Koperasi Sekunder	30	28	36	37	38

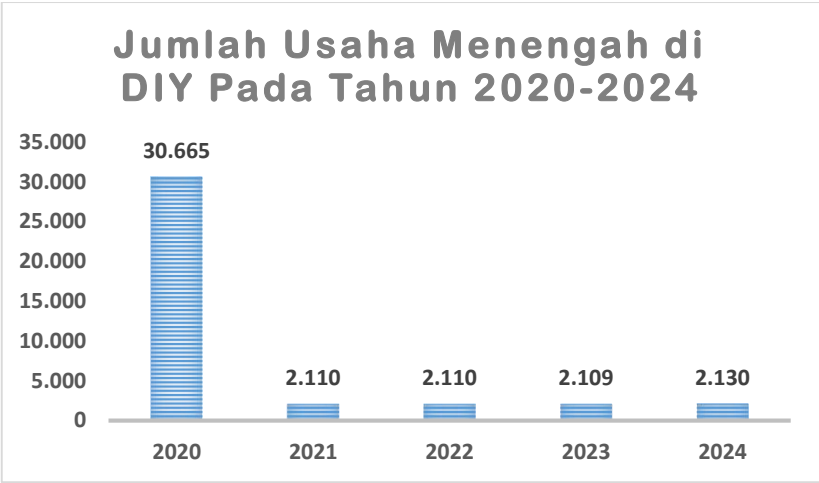
Sumber: Dinas Koperasi dan UKM DIY, 31 Desember 2024



Sumber: Dinas Koperasi dan UKM DIY, 2025 (diolah)



Sumber: Dinas Koperasi dan UKM DIY, 2025 (diolah)



Sumber: Dinas Koperasi dan UKM DIY, 2025 (diolah)

12. URUSAN PENANAMAN MODAL

Tabel Perkembangan Investasi Kumulatif di Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2020-2024

Tahun	Investasi PMDN (Rp000)	Investasi PMA (Rp000)	Total Investasi (Rp000)	Growth (Rp000)	Investation Growth
s.d 2020	19.931.377.693	9.485.961.961	29.417.339.654	2.823.382.580	10,62%
s.d 2021	22.692.647.593	9.803.584.510	32.496.232.103	3.078.892.969	10,46 %
s.d 2022	24.967.647.193	11.437.953.245	36.405.600.439	3.909.367.815	12,0%
s.d 2023	29.983.131.093	12.118.877.347	42.102.008.440	5.696.408.001	16%
s.d 2024	33.613.380.215	12.650.518.313	46.263.898.528	4.161.890.088	10%

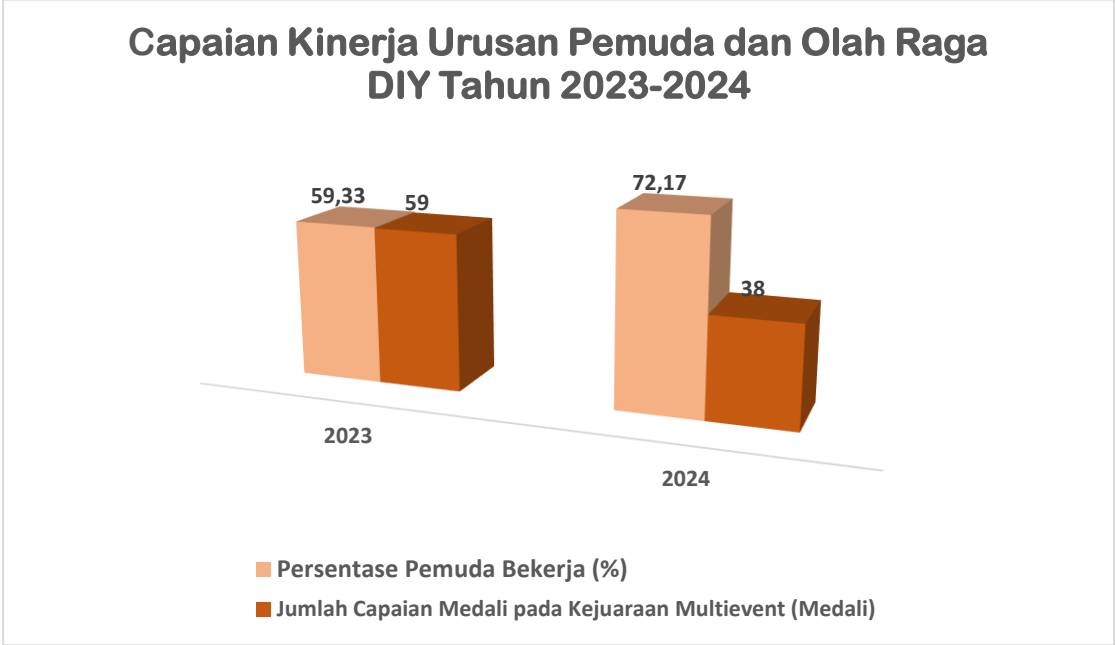
Sumber: DPMPTSP DIY, 2025

Tabel Perkembangan Investasi PMA & PMDN Kabupaten/Kota di DIY 2023 – 2024
(dalam rupiah)

LOKASI	TAHUN 2023			TAHUN 2024		
	PMDN	PMA	TOTAL	PMDN	PMA	TOTAL
BANTUL	553.435.700.000	133.855.589.576	687.291.289.576	605.014.658.243	122.108.349.428	727.123.007.671
GUNUNG-KIDUL	187.082.600.000	5.181.477.359	192.264.077.359	58.758.477.649	24.855.902.284	83.614.379.933
KULON PROGO	206.704.100.000	35.682.798.531	242.386.898.531	170.018.604.948	21.998.709.690	192.017.314.638
SLEMAN	3.412.655.100.000	235.331.785.097	3.647.986.885.097	2.030.198.815.502	261.238.738.987	2.291.437.554.489
YOGYAKARTA	655.606.400.000	270.872.450.857	926.478.850.857	766.258.565.457	101.439.265.689	867.697.831.146
TOTAL	5.696.408.001.422			4.161.890.087.878		

Sumber: DPMPTSP DIY, 2025

13. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

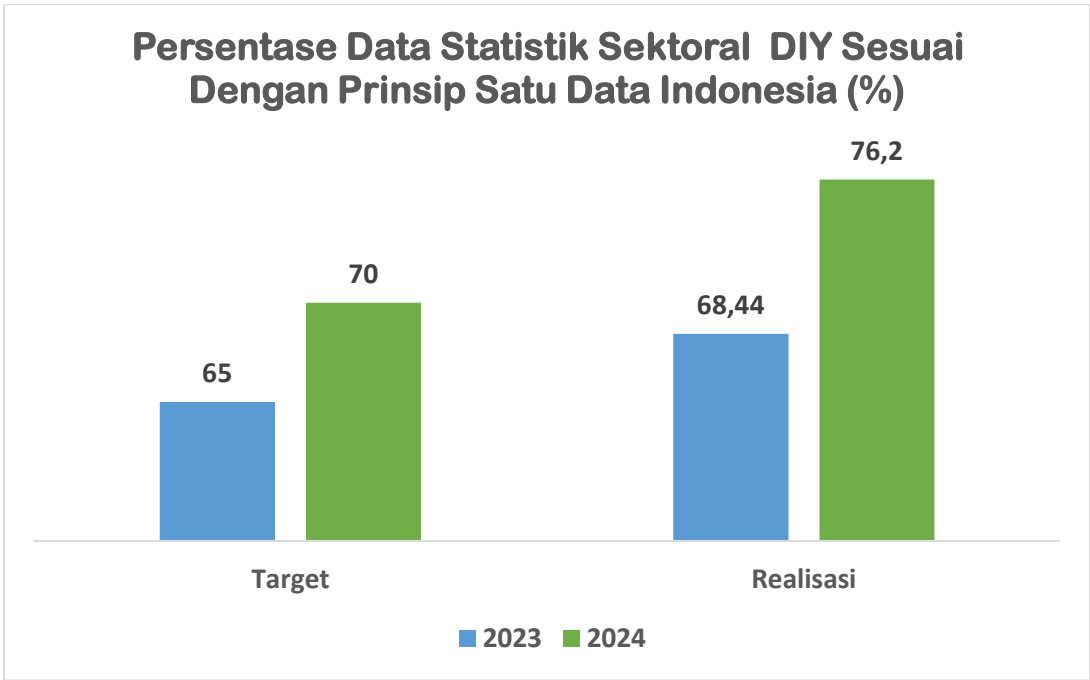


Sumber: Dikpora DIY, 2025 (diolah)

Berdasarkan Statistik Pemuda Indonesia 2024, persentase pemuda bekerja di DIY adalah sebesar 72,17%. Capaian ini diperoleh dari perbandingan jumlah pemuda yang melakukan kegiatan ekonomi dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dengan jumlah pemuda dikalikan 100 persen. Terdapat kenaikan capaian sebesar 12,84% dibandingkan capaian tahun 2023 sebesar 59,33% yang menunjukkan adanya kenaikan tingkat partisipasi pemuda baik sebagai pekerja maupun pelaku kewirausahaan.

Untuk jumlah capaian medali pada kejuaraan *multievent*, DIY memperoleh 38 medali pada kejuaraan Pra Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Pra POPNAS) Zona III Tahun 2024 yang digelar di Solo pada tanggal 11 s.d. 18 November 2024 dan Kejuaraan Antar PPLP/D/SKO Tahun 2024. Dalam Pra POPNAS kontingen DIY berhasil meraih peringkat ke-4 dengan total raihan medali sebanyak 20 medali yang terdiri dari 4 medali emas, 9 medali perak, dan 7 medali perunggu. Dalam Kejuaraan Antar PPLP/D/SKO Tahun 2024, DIY berhasil meraih 18 medali yang terdiri dari 7 emas, 3 perak, dan 8 perunggu.

14. URUSAN STATISTIK



Sumber: Bappeda DIY, 2025 (diolah)

15. URUSAN PERSANDIAN

Tabel Realisasi Kinerja Urusan Persandian di DIY Tahun 2023-2024

NO	JENIS PENILAIAN	RUANG LINGKUP	CAPAIAN TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2024
1	Penilaian Indeks Keamanan Informasi	Tata Kelola, Pengelolaan Risiko, Kerangka Kerja Keamanan Informasi, Pengelolaan Aset, Teknologi dan Keamanan Informasi	Total score 635 dari maksimum score 645	Total score 643 dari maksimum score 645
2	Penilaian Maturitas Keamanan Siber	Aspek Tata Kelola, Identifikasi, Proteksi, Deteksi, Respon	4,53 (Level Kematangan Tingkat V (<i>Optimized</i>) dari V)	4,39 (Level Kematangan Tingkat IV (Managed) dari V)

Sumber: Dinas Kominfo DIY, 2025

16. URUSAN KEBUDAYAAN

Tabel Jumlah Penyelenggaraan Event Budaya Tingkat Provinsi, Nasional, Internasional dengan Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah
1	Event Regional	8
2	Event Nasional	1
3	Event Internasional	5
Jumlah		15

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2024

Tabel Pengembangan Nilai Sejarah, Warisan Budaya Dan Museum Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah
1	Peningkatan kinerja sejarah bahasa dan permuseuman	915 buah
2	Peningkatan kinerja Cagar budaya yang ditetapkan sampai dengan 2024	774 buah
3	Warisan Budaya yang ditetapkan	212 buah
Jumlah		1901 buah

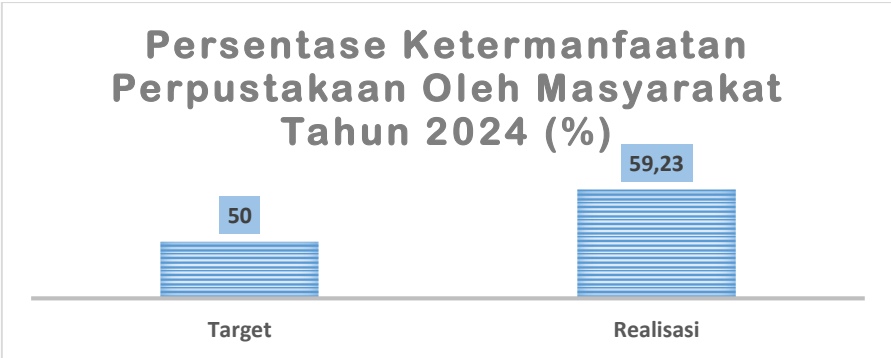
Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2024

Tabel Peningkatan Kinerja Pengembangan Seni Budaya dan Tradisi di DIY Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah kegiatan Fasilitasi Upacara Adat	9 lembaga
2	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Upacara Tradisi	3 Lembaga
3	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Sanggar	50 Lembaga
4	Jumlah Fasilitasi Even Kelompok Seni	305 Lembaga
5	Jumlah Kemitraan dengan Kelompok Seni	18 Lembaga
Jumlah		385 Lembaga

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2024

17. URUSAN PERPUSTAKAAN



Sumber: DPAD DIY, 2025 (diolah)

18. URUSAN KEARSIPAN



Sumber: DPAD DIY, 2025 (diolah)

D. RINGKASAN CAPAIAN URUSAN PILIHAN

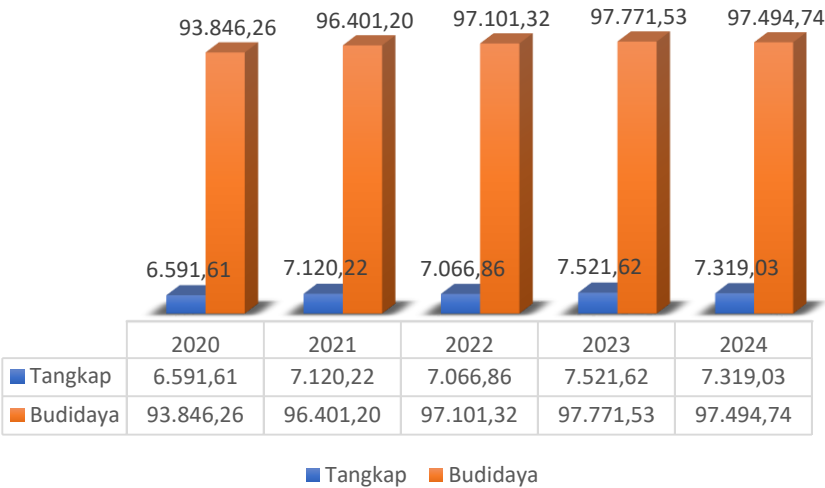
1. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Tabel Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2023	2024			Target Akhir RPJMD 2027	Capaian 2024 terhadap target akhir RPJMD 2027 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Nilai Produksi Perikanan Budidaya Dan Tangkap	juta rupiah	2.715.387	2.293.318	2.745.013	119,70	2.329.580	117,83
2	Nilai Produksi Perikanan Budidaya Kelompok Miskin	Juta rupiah	N/A	180	198	110,00	180	110,00
3	Luas Kawasan Konservasi Yang Ditetapkan (Ha) Berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang RZWP3K	Ha	N/A	5.670,87	5.670,87	100,00	5.822,92	97,39

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, 2025

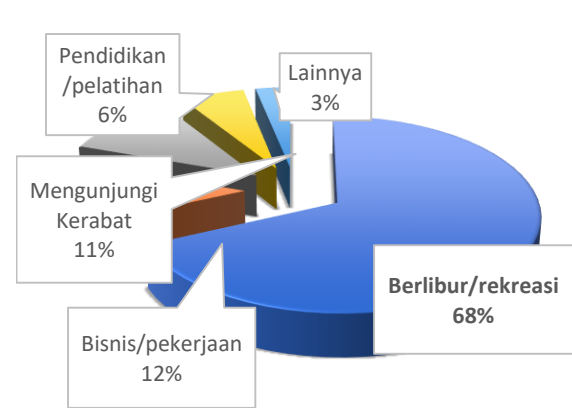
Gambar Grafik Produksi Perikanan Budidaya Dan Perikanan Tangkap di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 – 2024



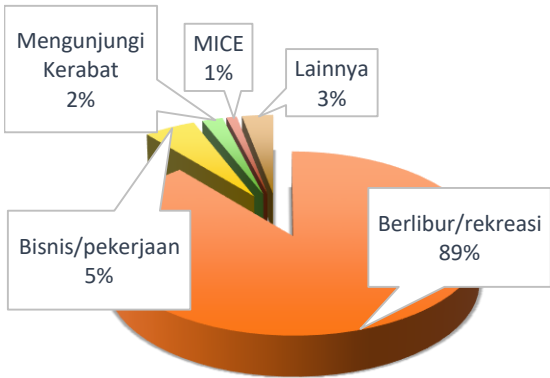
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan DIY 2025

2. URUSAN PARIWISATA

Minat Wisatawan Nusantara Mengunjungi
DIY Tahun 2024

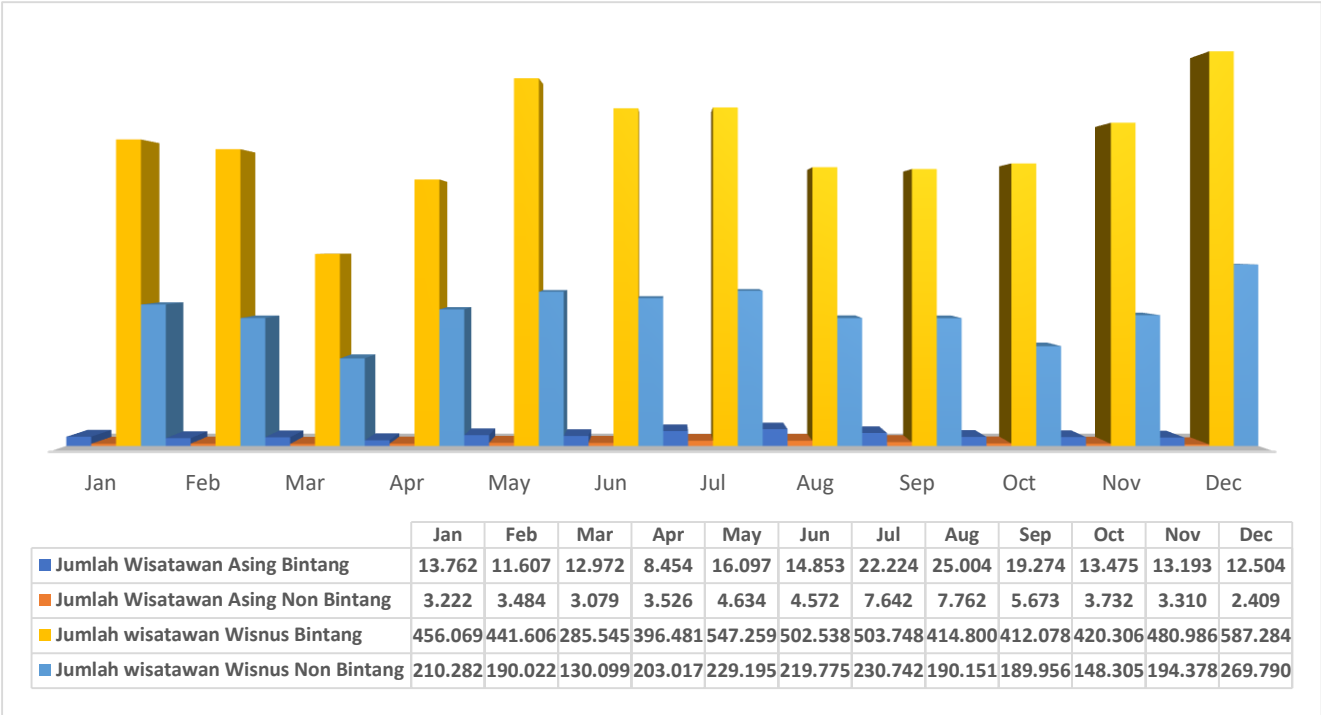


Minat Wisatawan Mancanegara Mengunjungi
DIY Tahun 2024

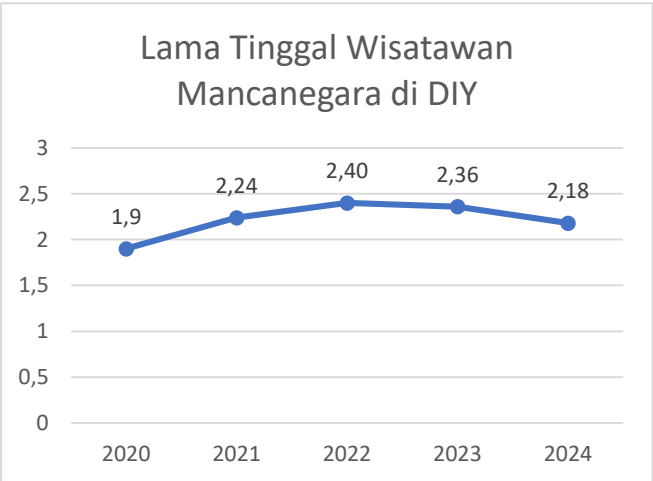


Sumber: Dinas Pariwisata DIY, 2025

Gambar Jumlah Wisman dan Wisnus di DIY Tahun 2024



Sumber: BPS DIY Tahun 2025 (data diolah)



Sumber: Dinas Pariwisata DIY & BPS DIY, 2025 (data diolah)

3. URUSAN PERTANIAN

Tabel Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2024
serta Capaian 2024 Terhadap Target Akhir RPJMD 2022-2027

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2023	2024			Target Akhir RPJMD 2027	Capaian 2024 Terhadap Target Akhir RPJMD 2027 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Tujuan							
Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dalam PDRB (ADHK)	Juta Rupiah	8.178.276*	8.180.687	8.207.475**	100,33	8.366.137	98,10
Peningkatan Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap kesesuaian tata ruang	%	0,003	1,980	2,386	120,51	1,980	120,52
Sasaran							
Rata-rata Persentase peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan	%	0,45	0,21	0,96	456,63	0,21	456,63
Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap kesesuaian tata ruang	%	0,017	2,010	2,416	120,20	7,940	30,43

Ket.: *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara
Sumber: BPS dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2025

Tabel Capaian Produksi Sub Sektor Tahun 2023 dan 2024**

No	Capaian Produksi Sub Sektor	Realisasi 2023	Realisasi 2024**	Rata-rata % Realisasi**
1.	Tanaman pangan (ton)	1.975.647	1.994.915	0,98
2.	Hortikultura (ton)	500.614	512.246	2,32
3.	Perkebunan (ton)	61.665	58.723	-4,77
4.	Peternakan (Animal Unit)	1.532.425	1.613.774	5,31
Rata-rata Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan (%)				0,96

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2025. Ket.: **) Angka Sangat Sementara

Tabel Produksi Tanaman Pangan di DIY Tahun 2023-2024*

No	Komoditas	Produksi (ton)	
		2023	2024**
1	Padi	534.114	458.583
2	Jagung	357.612	373.866
3	Kedelai	10.878	4.215
4	Kacang Tanah	75.782	62.378
5	Kacang Hijau	483	181
6	Ubi Kayu	991.498	1.091.861
7	Ubi Jalar	5.227	3.766
8	Sorghum	53	66
Jumlah		1.975.647	1.994.915

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2025. Ket.: **) Angka Sangat Sementara

Tabel Produksi Hortikultura di DIY Tahun 2023-2024*

No	Komoditas	Satuan	Produksi	
			2023	2024*
1	Cabai besar	Ton	2.423,66	6.387,77
2	Cabai rawit	Ton	21.383,59	22.553,01
3	Cabai keriting	Ton	44.198,51	46.036,25
4	Bawang merah	Ton	32.952,57	33.287,13
5	Pisang	Ton	78.543,15	87.666,25
6	Durian	Ton	13.601,59	12.094,6
7	Kelengkeng	Ton	2.485,92	2.616,8
8	Salak	Ton	51.841,25	46.503,32
9	Alpukat	Ton	11.734,96	14.182,72
10	Semangka	Ton	11.940,42	6.920,63
11.	Melon	Ton	10.884,86	9.159,71
12.	Jahe	Ton	4.821,59	4.940,58
13.	Kencur	Ton	2.697,54	2.690,03
14.	Kunyit	Ton	3.539,39	3.946,6
15.	Aglonema	Pohon	62.118	57.252
16	Anggrek Pot	Pohon	81.648	87.109

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2025. Ket.: *) Angka Sementara

Tabel Produksi Komoditas Perkebunan DIY Tahun 2023-2024**

No	Komoditas	Produksi			Wujud Produksi
		2023	2024**	% Pertumbuhan	
1	Kelapa	50.604,56	49.731,92	0,88	kopra
2	Tebu	4.399,26	3.224,33	-4,26	gula hablur
3	Kakao	1.893,44	1.848,02	-4,21	biji kering
4	Cengkeh	683,74	559,51	0,43	bunga kering
5	Tembakau Rakyat	670,10	535,32	0,02	daun kering
6	Kopi	1.872,39	1.270,86	-0,49	biji kering
7	Jambu Mete	698,40	630,97	-3,68	biji kering
8	The	23,58	228,67	-23,76	daun kering

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2025. Ket.: **) Angka Sangat Sementara

Tabel Populasi Ternak di DIY Tahun 2023-2024**

No	Komoditas	Populasi Ternak			
		2023 (ekor)	2023 (AU)	2024 (ekor)**	2024 (AU)**
1	Sapi Potong	227.037	172.548	285.060	216.646
2	Sapi Perah	2.876	2.186	2.997	2.278
3	Kuda	459	317	1.436	991
4	Kerbau	239	217,49	292	265,72
5	Babi	8.840	3.359	8.509	3.233
6	Kambing	435.713	47.928	426.973	46.967
7	Domba	92.311	12.000	154.636	20.103
8	Ayam Buras	2.796.124	55.922	3.537.777	70.756
9	Ayam Ras Petelur	6.924.954	138.499	7.810.316	156.206
10	Ayam Ras Pedaging	54.495.202	1.089.904	54.152.077	1.083.042
11	Itik	318.102	9.543	442.905	13.287
TOTAL		65.301.857	1.532.425	66.822.978	1.613.774

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2025. Ket.: **) Angka Sangat Sementara

4. URUSAN KEHUTANAN

Tabel Hasil Produksi Sektor Kehutanan 2022 - 2024

No	Sub Elemen	Tahun		
		2022	2023	2024
1	Hasil Hutan Kayu*			
1.1	Kayu Bulat (m3)	2.070,67	2.215,00	664,60
1.2	Kayu Gergajian (m3)	2.827,58	3.429,79	3.563,96
1.3	Kayu Olahan (m3)	8.408,87	9.302,31	6.956,85
1.4	Kayu Hutan Rakyat (m3)	92.158,99	60.553,97	27.744,76
2	Hasil Hutan Bukan Kayu			
2.1	Kayu Putih			
2.1.1	Jumlah Produksi Daun (ton)	4.415,00	2.216,5	2.168,75
2.2.2	Jumlah Produksi Minyak (L)	40.160,00	19.529	19.609,00
2.2.3	Jumlah PAD (Rp)	10.550.032.000,00	44.000.000,00	2.428.770.740,00
3	Luas Lahan Reboisasi			
3.1	Realisasi (ha)	60,00	30,00	378,00
4	Luas Lahan Penghijauan			
4.1	Pembuatan Baru (ha)	375,00	406,00	267,00
4.2	Pemeliharaan (ha)	10,00	n/a	243,00

Sumber: DLHK DIY, 2024. *) angka sementara

Meningkatnya jumlah PAD kayu putih pada tahun 2024 berasal dari penjualan minyak kayu putih stok Tahun 2023 melalui perjanjian jual beli, melalui koperasi ex-Dishutbun dan penjualan minyak kayu putih produksi Tahun 2024. Perdagangan minyak atsiri saat ini didominasi oleh minyak atsiri impor yaitu minyak *Eucalyptus*, sehingga atas kondisi tersebut dilakukan beberapa hal yaitu koordinasi dengan KLHK RI, Perhutani dan Kemendag untuk melakukan pembatasan impor minyak *Eucalyptus* dan pengenaan pajak atas minyak tersebut, serta dilakukan perjanjian jual beli dengan perorangan untuk minyak kayu putih sisa produksi Tahun 2024.

Tabel Indikator Kinerja Kunci Hasil Urusan Kehutanan Tahun 2023-2024

No.	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024
1.	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	%	100%	100%
2.	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi)	%	0	0
3.	Luas lahan kritis di provinsi yang direhabilitasi	%	6,20%	8,28%

Sumber: DLHK DIY, 2025

Berdasarkan hasil perhitungan, DIY sudah memberikan 100% akses legal kepada Kelompok Tani Hutan yang mengajukan IUPHKm dan IUPHHK-HTR. Pada Tahun 2024 luas hutan produksi dan hutan lindung DIY sebesar 19.036,42 ha, luas pengelolaan akses legal yang diberikan kepada Kelompok Tani Hutan sebesar 1.594,89 ha. Dengan demikian DIY sudah mencapai 8,37 % dari luasan kawasan hutan untuk mendapatkan izin Perhutanan Sosial.

5. URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

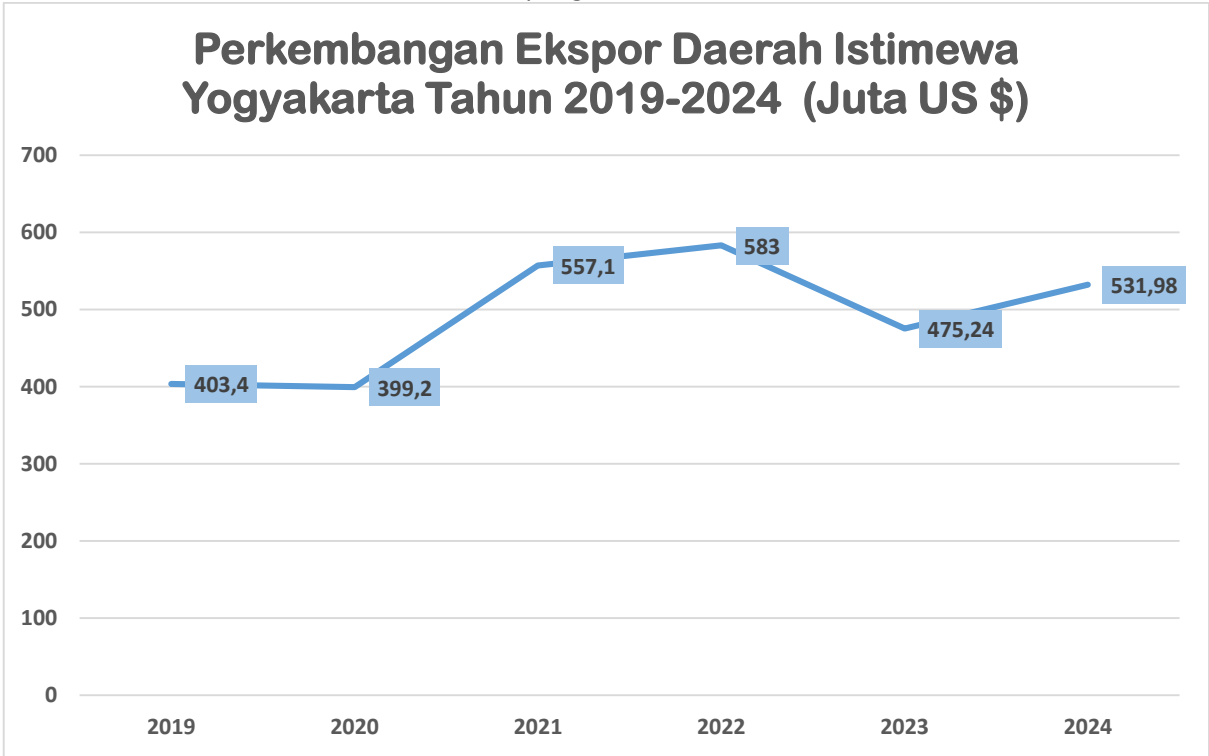
Tabel Target dan Realisasi Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral DIY Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2023	2024			Target Akhir RPJMD (2027) (%)	Capaian 2024 Terhadap Target Akhir RPJMD 2027 (%)
				Target	Realisasi	Realisasi (%)		
1	Persentase Rumah Tangga berakses listrik	%	99,99%	99,99%	99,99 %	100	99,99	100
2	Persentase pengusaha kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan pola ruang	%	9,17 %	9,23 %	9,23 %	100	9,38	98,40
3	Pengendalian Rerata Penurunan Muka Air Tanah	%	< 20 %	< 20 %	< 20 %	100	< 20	100

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2025

6. URUSAN PERDAGANGAN

Kinerja sektor perdagangan ditunjukkan dengan peningkatan nilai ekspor. Selama lima tahun terakhir, ekspor DIY menunjukkan tren positif. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya nilai ekspor dari tahun 2019 ke tahun 2024 dengan peningkatan sebesar 24,95%. Nilai Ekspor Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2024 tercatat USD 531,98 Juta (angka proyeksi) atau meningkat sebesar USD 132,78 juta jika dibandingkan dengan tahun 2019. Pakaian jadi bukan rajutan, perabot, penerangan rumah, barang-barang dari kulit merupakan tiga komoditas dengan kontribusi terbesar selama tahun 2024. Tiga Negara Tujuan Ekspor dengan kontribusi terbesar adalah Amerika Serikat, Jerman, dan Jepang.



Sumber: BPS DIY, 2025 (diolah)

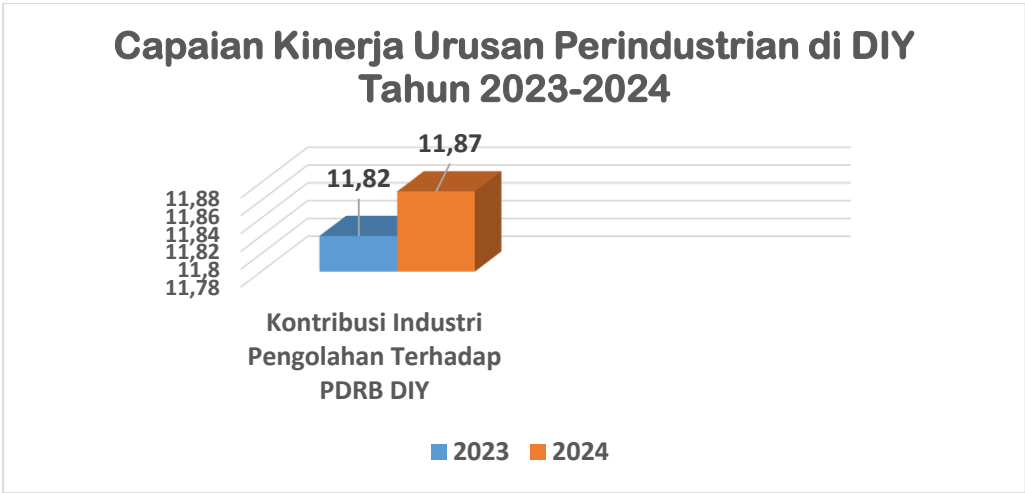
7. URUSAN PERINDUSTRIAN

Tabel Perkembangan IKM di DIY Tahun 2020-2024

IKM	2020	2021	2022	2023	2024
Unit usaha (UU)	96.597	96.954	98.408	102.787	108.440*
Tenaga kerja (orang)	355.319	356.634	361.984	378.092	373.483
Nilai investasi (Rp Juta)	1.992.422	1.999.794	2.029.791	2.120.117	2.236.72*3

IKM	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai produksi (Rp Juta)	12.465.398	12.511.520	13.224.676	13.813.174	14.572.898*
Nilai bahan baku dan penolong (Rp Juta)	7.204.311	7.230.967	7.339.432	7.666.037	8.087.669*

Sumber: BPS, Disperindag DIY, 2025 (*angka proyeksi)

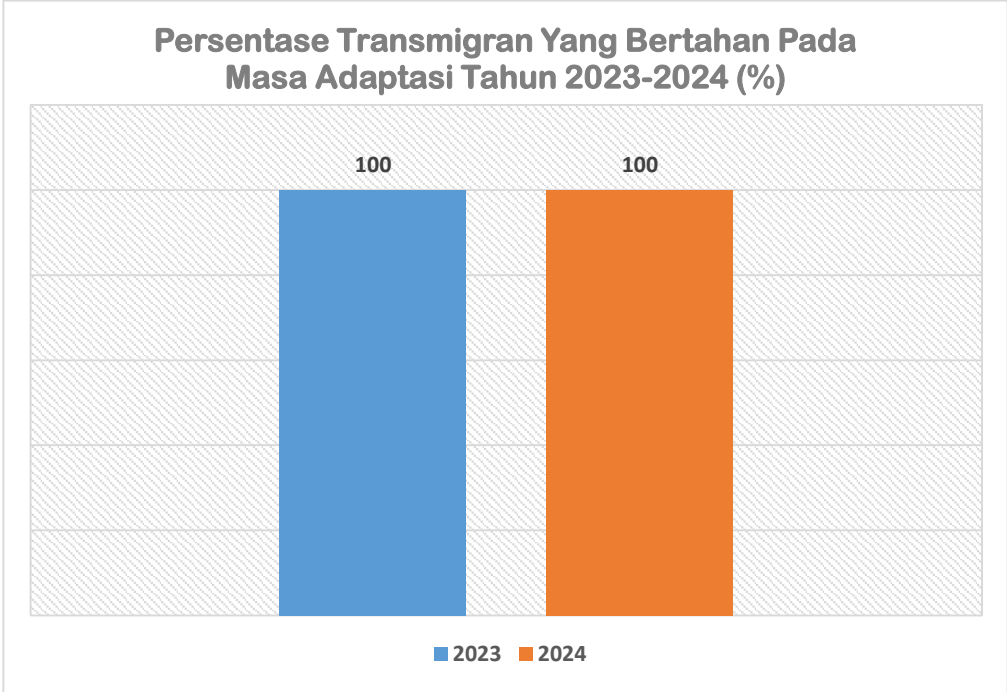


Sumber: BPS, Disperindag DIY, 2025 (*angka proyeksi)

8. URUSAN TRANSMIGRASI



Sumber: Disnakertrans DIY, 2025 (diolah)



Sumber: Disnakertrans DIY, 2025 (diolah)

E. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD DIY tahun 2022-2027, terdapat 7 sasaran Pemerintah Daerah dengan 13 indikator sasaran Perangkat Daerah yang menjadi indikator kinerja utama sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan Pemda DIY. Capaian indikator tersebut disajikan sebagai berikut:

Tabel–1 Capaian Kinerja Pemda DIY Tahun 2024 dibandingkan Capaian Kinerja Tahun 2023

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian 2023	Target RKPD Tahun 2024	Capaian 2024	Persentase Capaian Tahun 2024 Dibandingkan Target RKPD Tahun 2024 (%)
Terwujudnya kualitas hidup kehidupan penghidupan masyarakat	1. Indeks Pertumbuhan Inklusif/IGI (<i>Inclusive Growth Index</i>)			Angka Indeks	6,01	6,42	5,90*	91,90* (Tidak Tercapai)
	2. Indeks Kebahagiaan			Angka Indeks	72,93	73,41	71,70	97,67 (Tidak Tercapai)
		1) Semakin kecilnya tingkat kemiskinan	01. Angka Kemiskinan	Persen	11,04	10,16	10,40	97,63 (Tidak Tercapai)
		2) Penghidupan ekonomi yang layak	02. Angka Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB	Persen	5,07	5,1-5,6	5,03	94,19 (Tidak Tercapai)
			03. Perndapatan Per Kapita (Rp juta) ADHK	Juta	31,75	30,23	33,14	109,63 (Tercapai)
			04. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Angka	3,69	3,45-3,80	3,48,	108,42 (Tercapai)
			05. Inflasi	Persen	3,30	2-4	1,28	168,00 (Tercapai)
		3) Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan	06. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka Indeks	81,09	81,38-81,56	81,62	100,32 (Tercapai)
Mengecilnya Ketimpangan Wilayah	3. Indeks Williamson			Angka Indeks	0,4831	0,441	0,4836	90,34 (Tidak Tercapai)
		4) Meningkatkan kapasitas ekonomi pada ndicat belum maju	08. Kontribusi PDRB ndicat belum maju terhadap keseluruhan PDRB DIY	Persen	40,15	40,09	40,10	100,02 (Tercapai)
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	4. Indeks Reformasi Birokrasi			Angka Indeks	A	A	A	100 (Tercapai)
		5) Meningkatkan Good Governance	09. Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	100 (Tercapai)
			10. Nilai SAKIP	Angka	AA (92,10)	AA	AA (92,65)	100 (Tercapai)
			11. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Angka	85,62	74,33	83,88	112,85 (Tercapai)
Terwujudnya Lingkungan Hidup yang lebih baik	5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			Angka Indeks	66,29	63,29	68,44	108,14 (Tercapai)
		6) Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	12. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persen	N/a	82,62	82,83	100,25 (Tercapai)

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian 2023	Target RKPD Tahun 2024	Capaian 2024	Persentase Capaian Tahun 2024 Dibandingkan Target RKPD Tahun 2024 (%)
		7) Menurunnya risiko bencana	13. Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY	Angka Indeks	108,15	113,11	102,83	109,09 (Tercapai)

Sumber: BAPPEDA DIY, 2025 (Data diolah) Ket: *(angka proyeksi

Berdasarkan tabel Pengukuran Indikator Kinerja Utama Pemda DIY pada tahun 2024 menunjukkan dari 4 Tujuan Pemda dengan 5 indikator tujuan, terdapat 2 (dua) indikator kinerja tujuan yang memiliki persentase capaian $\geq 100\%$ terhadap target RPJMD DIY tahun 2022-2027. Dengan demikian, masih terdapat 3 (tiga) indikator kinerja tujuan yang belum tercapai sesuai dengan target yaitu: Indeks Pertumbuhan Inklusif, Indeks Kebahagiaan dan Indeks Williamson.

Selanjutnya dari 7 Sasaran Pemda dengan 13 indikator sasaran, terdapat 10 (sepuluh) indikator kinerja sasaran yang memiliki persentase capaian $\geq 100\%$ terhadap target RPJMD DIY tahun 2022-2027. Dengan demikian, masih terdapat 3 (tiga) indikator kinerja tujuan yang belum tercapai sesuai dengan target yaitu: Angka Kemiskinan, Angka Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) dan Indeks Pembangunan Kebudayaan.

Capaian kinerja Tahun 2024 jika dibandingkan dengan capaian Kinerja Tahun 2023, Indikator Kinerja Utama yang mengalami peningkatan kinerja dibandingkan capaian tahun 2023 yaitu Pendapatan Perkapita, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Kebudayaan, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Indeks Risiko Bencana. Sedangkan masih terdapat pekerjaan rumah yang menjadi permasalahan yang belum terselesaikan dan menjadi sorotan di masyarakat yaitu angka kemiskinan dan ketimpangan.

F. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

1. Hasil EPPD Tahun sebelumnya
- Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 Tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2023 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022 berhasil mendapatkan hasil EPPD dengan skor kinerja 3,53 dan status kinerja tinggi (peringkat ke-5 Nasional).
2. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya
- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Pemda DIY Tahun 2023 Nomor 9A/LHP/XVIII.YOG/03/2024, Pemda DIY berhasil mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pemda DIY telah memperoleh opini BPK WTP ke-14 (empatbelas) kalinya sejak Laporan Keuangan Tahun 2010 dan telah sesuai dengan target yang ditentukan.

G. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Tabel Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	5.911.030.364.311,00	6.025.070.171.261,08	101,93	5.840.561.001.091,65
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.353.982.421.068,00	2.481.506.565.559,08	105,42	2.368.679.166.252,65
4.1.01	Pajak Daerah	2.059.869.703.526,00	2.157.532.293.945,00	104,74	2.069.612.267.000,57
4.1.02	Retribusi Daerah	73.205.530.203,00	79.460.801.542,00	108,54	33.213.267.052,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	121.749.510.238,00	120.935.677.671,93	99,33	109.790.680.460,56
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	99.157.677.101,00	123.577.792.400,15	124,63	156.062.951.739,52
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.353.982.421.068,00	2.481.506.565.559,08	105,42	2.368.679.166.252,65
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.549.191.703.243,00	3.535.479.452.702,00	99,61	3.463.926.176.823,00
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.548.207.898.013,00	3.534.495.647.472,00	99,61	3.463.090.270.403,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	983.805.230,00	983.805.230,00	100,00	835.906.420,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.856.240.000,00	8.084.153.000,00	102,90	7.955.658.016,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	7.856.240.000,00	8.084.153.000,00	102,90	7.950.630.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	5.028.016,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.856.240.000,00	8.084.153.000,00	102,90	7.955.658.016,00
	JUMLAH PENDAPATAN	5.911.030.364.311,00	6.025.070.171.261,08	101,93	5.840.561.001.091,65
5	BELANJA DAERAH	6.001.565.896.865,00	5.680.495.088.297,12	94,65	5.705.855.917.726,41
5.1	BELANJA OPERASI	3.800.942.364.499,00	3.589.908.402.394,35	94,45	3.504.788.744.020,20
5.1.01	Belanja Pegawai	1.752.750.894.932,00	1.651.782.965.460,00	94,24	1.572.322.039.241,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.237.669.188.360,00	1.155.896.100.440,35	93,39	1.245.945.486.879,20
5.1.04	Belanja Subsidi	82.570.477.931,00	75.368.890.530,00	91,28	74.269.644.598,00
5.1.05	Belanja Hibah	672.421.760.776,00	653.554.770.630,00	97,19	583.965.119.370,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	55.530.042.500,00	53.305.675.334,00	95,99	28.286.453.932,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	3.800.942.364.499,00	3.589.908.402.394,35	94,45	3.504.788.744.020,20
5.2	BELANJA MODAL	729.146.199.080,00	659.153.310.940,95	90,40	745.354.723.452,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	36.434.585.000,00	35.792.256.125,00	98,24	169.306.929.192,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	209.109.759.556,00	204.099.193.397,00	97,60	186.110.825.035,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	281.419.731.340,00	220.538.449.546,95	78,37	150.886.570.710,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	185.585.676.953,00	182.299.322.051,00	98,23	225.450.247.009,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.727.993.431,00	11.562.606.421,00	98,59	13.437.651.506,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	4.868.452.800,00	4.861.483.400,00	99,86	162.500.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	729.146.199.080,00	659.153.310.940,95	90,40	745.354.723.452,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	12.443.010.243,00	20.000.000,00	0,16	198.487.268,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	12.443.010.243,00	20.000.000,00	0,16	198.487.268,00
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	12.443.010.243,00	20.000.000,00	0,16	198.487.268,00
5.4	BELANJA TRANSFER	1.459.034.323.043,00	1.431.413.374.961,82	98,11	1.455.513.962.986,21
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	881.009.565.433,00	870.359.406.509,00	98,79	886.411.063.641,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	578.024.757.610,00	561.053.968.452,82	97,06	569.102.899.345,21
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	1.459.034.323.043,00	1.431.413.374.961,82	98,11	1.455.513.962.986,21
	JUMLAH BELANJA	6.001.565.896.865,00	5.680.495.088.297,12	94,65	5.705.855.917.726,41
	SURPLUS/DEFISIT	(90.535.532.554,00)	344.575.082.963,96	(380,60)	134.705.083.365,24
6	PEMBIAYAAN DAERAH	90.535.532.554,00	93.121.146.320,48	102,86	160.555.386.955,24
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	293.035.532.554,00	295.621.146.320,48	100,88	465.555.386.955,24
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	293.035.532.554,00	295.260.470.320,48	100,76	462.271.562.955,24
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	360.676.000,00	0,00	3.283.824.000,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	293.035.532.554,00	295.621.146.320,48	100,88	465.555.386.955,24
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	202.500.000.000,00	202.500.000.000,00	100,00	305.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	200.000.000.000,00	200.000.000.000,00	100,00	300.000.000.000,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100,00	5.000.000.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	202.500.000.000,00	202.500.000.000,00	100,00	305.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	90.535.532.554,00	93.121.146.320,48	102,86	160.555.386.955,24
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	437.696.229.284,44	0,00	295.260.470.320,48

Sumber: BPKA DIY, 2025 (Unaudited)

H. INOVASI DAERAH

Rincian inovasi daerah yang memenuhi syarat kematangan untuk diikutkan dalam *Innovative Government Adward* (IGA) Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. SIMPATI DATAKU (Sistem Informasi Pengelolaan Data dan Informasi dengan DATAKU)
2. SEPATU JOLIFA
3. Sungguh Untuk Akuntabilitas Kinerja Pembangunan Jogja Istimewa
4. Aplikasi E-Office Sisminkada
5. FPKK DIY (Forum Perlindungan Korban Kekerasan)
6. Geoportal DIY
7. Sistem Informasi Kalurahan (SINKAL)
8. Lumbung Mataraman

9. "GRHASIA SIAP ANGKAT ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (GRHASIA SADEWA) "
10. Pengadaan Barang dan Jasa Berkelanjutan
11. ASN Memayu
12. Aplikasi Manajemen Pengetahuan-Wiki Jogjapro
13. Manunggal Raharja
14. INSAN PUPR BERKUMIS: Integrasi Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Berkolaborasi Untuk Mengurangi Kemiskinan di DIY
15. Aplikasi Kenes
16. Go Hidro (Aplikasi Monitoring Telemteri Untuk Pemantauan Data Hidrologi)
17. KURASI PRODUK PKG YIA (Kurasikan Produk Pasar Kotagede YIA)
18. Samoli
19. SIKRESNO (SISTEM KENDALI REGISTRASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN POLITIK)
20. Jogja Business Service Center
21. PESONA TERAS (Pengelolaan Sampah Organik dan Anorganik Tenant dan Masyarakat)
22. DIORAMA ARSIP JOGJA
23. SI YOKCA
24. MOMENKU SIAP BERKEMAS
25. Aku Siap Makarti
26. Saliman
27. Ekstensi Sistem Penanggulangan Kegawatdaruratan Terpadu (E-SPGDT)
28. Penguatan Kelembagaan Pariwisata serta Klasifikasi Desa/ Kampung Wisata dan Homestay
29. SIBUKIN (Sistem Informasi Buku Induk) - Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas DIY
30. ARUNIKA (Aplikasi Terintegrasi Untuk Administrasi Penilaian Kompetensi ASN)
31. Pengembangan Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
32. OMAH JAGA WARGA
33. COMMAND CENTER PERTANAHAN DAN TATA RUANG
34. Jogja Hijau
35. SIPANDU (Sistem Informasi Pelatihan Tenaga Kesehatan Terpadu)
36. Pemuliaan Induk Ikan Nila Merah
37. Integrated Management Training (IMT) Berbasis Android Mobile
38. Sarana Sawiji Advokasi Hubungan Industrial (Sasadhara)
39. Si Pojak
40. LELE GACOR (Lele Generasi Air Kocor)
41. APLIKASI POSBINDU SATRIYA
42. Integrasi Informasi Angkutan Umum Melalui Digital Signage di Halte Transjogja
43. Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran DIY
44. E-SPPD
45. Sistem Informasi Bantuan Hibah (SIMBAH)
46. FOKOMDIYA
47. Inovasi Upgrading Laman Website JDIH DPRD DIY

Disamping inovasi daerah, sepanjang tahun 2024 Pemda DIY mendapatkan penghargaan/penilaian secara nasional berkaitan dengan capaian tata kelola pemerintahan, di antaranya adalah:

1. Pemerintah Daerah DIY memperoleh Digital Government Award dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Terbaik pada Kategori Provinsi. Penghargaan dari Kementerian PANRB ini diterima langsung oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam gelaran SPBE *Summit* 2024 dan Peluncuran *GovTech* Indonesia, pada tanggal 27 Mei 2024 di Istana Negara, Jakarta;
2. Pemerintah Daerah (Pemda) DIY meraih penghargaan *Inabuyer Award* 2024 kategori Pemerintah Provinsi dari Kementerian Koperasi dan UKM RI. Penghargaan ini diberikan karena Pemda DIY dinilai telah melakukan transaksi pembelian produk UMKM dan koperasi terbesar tahun 2023, melalui sistem pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah(LKPP). Penghargaan diberikan dalam acara Inabuyer B2B2G (*Bussines to Bussines & Bussines to Government*) Expo 2024 yang digelar di Gedung Smesco, Jakarta pada tanggal 17 Mei 2024;
3. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) berhasil meraih Penghargaan Hasil Pengawasan Kearsipan, terbaik I nasional dengan predikat "AA" (Sangat Memuaskan) atas prestasi dalam pengelolaan kearsipan Tahun 2023 untuk kategori Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Pemerintah Provinsi. Penghargaan diberikan di Hotel Mercure, Samarinda, Kalimantan Timur, pada tanggal 29 Mei 2024;

4. Pemda DIY memperoleh Penghargaan Karya Bhakti Satpol PP dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) di Lapangan Istana Gubernur Sumatera Barat, Padang, pada tanggal 2 Maret 2024 bersamaan dengan penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional HUT ke 74 Satpol PP dan HUT ke 62 Satlinmas;
5. Piagam penghargaan dengan peringkat terbaik, diberikan kepada DIY melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka penyampaian laporan kelancaran penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024 di daerah. Penghargaan ini diterima pada tanggal 2 April 2024 di Hotel Salak The Heritage, Bogor, Jawa Barat. Penyerahan penghargaan dilakukan pada acara Evaluasi Hasil Pelaporan Data dan Informasi pada Sistem Informasi Pemantauan Perkembangan Situasi Politik di Daerah;
6. Kepesertaan BPJS Kesehatan DIY mencapai 100%, dan menjadi satu-satunya di Indonesia yang mencapai persentase tersebut. Prestasi ini mengantarkan Pemda DIY meraih penghargaan *Universal Health Coverage* (UHC) Tahun 2024 dari BPJS Kesehatan. Penghargaan diberikan pada tanggal 8 Agustus 2024 di The Krakatau Grand Ballroom, Jakarta;
7. Pemda DIY memperoleh penghargaan sebagai pemenang kategori Program Literasi Keuangan Pemerintah Provinsi pada *Financial Literacy Award* 2024 pada tanggal 22 Agustus 2024 di JIEXPO *Convention Centre and Theatre*, Jakarta;
8. Pada Gelaran Standar Pelayanan Minimal (SPM) *Awards* yang diselenggarakan Kemendagri atas Penerapan SPM di Daerah Tahun 2023 pada tanggal 24 April 2024 di Jakarta, DIY masuk dalam kategori 10 Provinsi Terbaik: Peringkat ke 6 (enam) Penerapan SPM se Indonesia dengan nilai 94,60;
9. Pada Perayaan Hari Otonomi Daerah tanggal 25 April 2024 di Kota Surabaya, Pemda DIY meraih penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai Pemerintah Daerah dengan Status Kinerja Tinggi dan mendapatkan peringkat ke 5 (lima) se Indonesia;
10. Pemerintah Daerah DIY meraih penghargaan Anugerah Pandu Negeri 2024 kategori pemerintah daerah dengan kinerja dan governansi sangat memuaskan pada tanggal 5 September 2024 di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta. Hal ini telah menunjukkan, bahwa kinerja Pemda DIY dalam mengelola tata kelola pemerintah sudah sangat baik. Penganugerahan ini dilaksanakan oleh *Indonesian Institute for Public Governance* (IIPG);
11. Pemda DIY menerima penghargaan *Championships* Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Jakarta, Senin tanggal 23 September 2024. DIY berhasil meraih tiga penghargaan yaitu Terbaik III Kategori TP2DD Provinsi untuk wilayah Jawa-Bali dan Terbaik III Kategori Program Unggulan P2DD Provinsi secara Nasional. Lebih lanjut, sebagai Bank RKUD di wilayah DIY, Bank BPD DIY juga meraih predikat Terbaik III Kategori Bank Pembangunan Daerah Pendukung ETPD secara Nasional. Penghargaan ini diberikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Rakornas P2DD) Tahun 2024;
12. Pemda DIY menerima penghargaan anugerah Anindhita Wistara Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) RI pada tanggal 26 September 2024 di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta.. Pemda DIY meraih predikat terbaik III kategori pemerintah provinsi. Penghargaan tersebut diberikan kepada Pemerintah Daerah DIY karena dinilai memiliki nilai indeks pembangunan statistik terbaik dalam penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (EPSS) tahun 2024. Atas capaian ini, diharapkan DIY tetap kuat dalam perencanaan pembangunan daerah dengan didukung data yang unggul dan berkualitas;
13. Pemda DIY kembali mengukir prestasi karena berhasil tujuh kali berturut-turut sejak 2018 hingga 2024 meraih predikat AA atau Sangat Memuaskan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) RI. Penghargaan tersebut diterima langsung Gubernur DIY dalam Penyerahan Hasil Evaluasi AKIP Pemerintah Daerah Tahun 2024 di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2024;
14. DIY dinobatkan sebagai daerah setingkat provinsi yang terbaik dalam kategori Sub Indeks *Enabling Environment* pada penghargaan Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional (IPKN) 2024. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Sandiaga Uno dalam Forum *East Java Travel and Tourism* 2024 yang digelar di Vasa Hotel, Surabaya pada 15 Oktober 2024;
15. Pemda DIY kembali mencatatkan prestasi gemilang dengan memborong tiga penghargaan sekaligus pada Bhumandala Award Tahun 2024. Ketiga penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wakil Gubernur (Wagub) DIY, KGPAA Paku Alam X di Ballroom Grand Studio Metro TV Jakarta Barat pada 4 November 2024. Tiga penghargaan yang diraih Pemda DIY, yakni:
 - a. Bhumandala Kanaka (medali emas) pada kategori kinerja simpul jaringan informasi *geospasial*;
 - b. Bhumandala Kanaka (medali emas) pada kategori pengelolaan informasi *geospasial* di DIY;
 - c. Bhumandala Rajata (medali perak) pada kategori informasi *geospasial* batas Desa/Kelurahan.
16. Pemerintah Daerah DIY meraih penghargaan sebagai Terbaik Pertama pada Kategori Kepatuhan Pemerintah Provinsi terhadap Pelaksanaan Evaluasi RPJPD sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024. Penghargaan ini diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Penghargaan

- diberikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya Sugiarto dalam acara Rakornas Pembangunan Daerah 2024 di Kota Medan, Sumatera Utara pada 11 Desember 2024.
17. Pemerintah Daerah (Pemda) DIY mendapatkan penghargaan Kategori Kinerja Total Tingkat Provinsi Fiskal Sedang, dalam Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah (AKPD) 2024 yang digelar di JW Marriot Hotel, Kuningan, Jakarta Selatan pada 12 Desember 2024 malam. Ajang apresiasi bagi pemerintah daerah ini merupakan hasil kolaborasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).RI bersama Tempo Media Group.
 18. Geopark Jogja telah mengukir prestasi gemilang dengan meraih penghargaan sebagai Aspiring Geopark Nasional Terbaik dalam Anugerah Bangga Berwisata di Indonesia (ABBWI) 2024. Acara penghargaan ini berlangsung pada 13 Desember 2024, di Gelanggang Seni Budaya (GESIBU) Blambangan, Banyuwangi;
 19. Pemda DIY memperoleh penghargaan sebagai Terbaik Pertama Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2024 untuk Kategori Pemerintah Provinsi. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas pada kegiatan Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum pada 16 Desember 2024 di Kampus Politeknik Pengayoman Indonesia, Tangerang, Banten.
 20. Pemda DIY Meraih Penghargaan Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik Tahun Anggaran 2023 kategori Kapasitas Fiskal Rendah dengan Tahun Ukur 2024 dari Badan Strategi Kebijakan Kemendagri (BSKDN) Pada Tanggal 16 Desember 2024 di Command Center BSKDN Jakarta Pusat;
 21. Sebagai daerah yang sangat aktif menjaga dan mengembangkan budaya, DIY diganjar dengan piala emas pada penghargaan Anugerah Kebudayaan Indonesia oleh Kementerian Kebudayaan RI. Menteri Kebudayaan RI, Fadly Zon menyerahkan langsung penghargaan pada Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, 18 Desember 2024 di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Jakarta;
 22. Pemda DIY Kembali menorehkan prestasi dengan meraih predikat Badan Publik Informatif dengan skor 97,57 dalam Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat pada tanggal 17 Desember 2024;
 23. Penghargaan Anugrah Merdeka Belajar untuk Pemerintah Daerah kategori “Pengelolaan Program Indonesia Pintar sebagai Pemerintah Daerah Transformatif” Tahun 2024 yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
 24. Penghargaan Sistem Manajemen Pengawasan Keamanan Pangan Segar bagi Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) DIY dari Badan Pangan Nasional yang diterima pada tanggal 19 Juni 2024;
 25. Penghargaan Pelaksana Gerakan Pangan Murah Provinsi Terbaik 1 Tahun 2023 dari Badan Pangan Nasional yang diterima pada tanggal 23 Juli 2024;
 26. Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) dari Kementerian Ketenagakerjaan RI kategori Terbaik Peringkat ketiga berdasarkan Urusan Ketenagakerjaan Sedang. Dan Penghargaan atas Keberhasilan Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan Tahun 2024;
 27. Pemda DIY telah mendapatkan Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) 2024 oleh sebagai provinsi terbaik dalam pengelolaan sistem transportasi publik yang merupakan bentuk apresiasi dari Kementerian Perhubungan kepada daerah yang dinilai berhasil dalam menata dan mengelola sistem transportasi publik;
 28. Piagam Penghargaan atas aktifnya dalam mendukung Program Percepatan Penurunan Stunting di Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Republik Indonesia pada tanggal 21 Juli 2024 di Yogyakarta;
 29. Piagam Penghargaan PLUT Award 2024 Juara 2 PLUT KUMKM Tingkat Provinsi oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI pada tanggal 9 Oktober 2024 di Jakarta;
 30. Penghargaan Peringkat II Lomba BPTPH Berprestasi Tahun 2023 dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian yang diterima pada bulan Januari 2024;
 31. Penghargaan Anindhita Wistara Data sebagai Provinsi Terbaik III dengan Indeks Pembangunan Statistik “Baik” dari BPS RI yang diterima pada tanggal 26 September 2024.
 32. Penghargaan Pelaksanaan Proses Percepatan Pencairan Bantuan Keuangan Partai Politik dari Kementrian Dalam Negeri yang berhasil menyelesaikan proses pencairan bantuan keuangan partai politik di bulan Maret 2024 yang merupakan tindak lanjut dari Surat Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum Nomor: 900.1.10/e-3/Polpum tentang Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2024;
 33. Tahun 2024 Pemda DIY telah mendapatkan penghargaan di bidang urusan kebudayaan yaitu Penghargaan Anugerah Kebudayaan Indonesia oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia;
 34. Pada Tahun 2024, Daerah Istimewa Yogyakarta meraih penghargaan 10 Provinsi dengan Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Tani Hutan Tertinggi Nasional dalam Rapat Koordinasi Nasional Penyuluhan Kehutanan (Rakornasluhut) tahun 2024;
 35. Pengelola Keuangan Daerah Terbaik Tahun Anggaran 2023 dengan Kapasitas Fiskal Rendah SEBAGAI HASIL hasil dari pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran (TA) 2023 dengan Tahun Ukur 2024 dari Kementerian Dalam Negeri;

36. APBD Award tingkat Provinsi untuk Pemda DIY dengan Kategori Rasio Belanja Terhadap Pendapatan Tertinggi Kementerian Dalam Negeri;
37. Provinsi dengan Program Unggulan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Terbaik III Tahun 2024 Kemenko Perekonomian;
38. Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Terbaik III Wilayah Jawa-Bali Kemenko Perekonomian;
39. Peringkat II atas Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2023 dengan Tahun Ukur Tahun 2024 dari Kementerian Keuangan ;
40. Di Bidang Kepegawaian Pemerintah Daerah DIY mendapatkan sebagai berikut:
 - a. Penghargaan SANGAT BAIK dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi tahun 2023;
 - b. Penghargaan Indeks Profesionalitas ASN terbaik Tahun 2024;
 - c. Penghargaan Realisasi Penetapan NI PPPK Tercepat Tahun 2024.
41. Pada Perayaan Hari Otonomi Daerah tanggal 25 April 2024 di Kota Surabaya, Pemda DIY meraih penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai Pemerintah Daerah dengan Status Kinerja Tinggi dan mendapatkan peringkat ke 5 (lima) se Indonesia;
42. Pada Gelaran Standar Pelayanan Minimal (SPM) Awards Tanggal 24 April 2024 atas Penerapan SPM Tahun 2023 di Jakarta, DIY masuk dalam kategori 10 Provinsi Terbaik: Peringkat ke 6 (enam) Penerapan SPM se Indonesia;
43. Pada Tahun 2024 Prestasi/Penghargaan yang diterima Pemda DIY melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagai Pembina Kabupaten/Kota Peduli HAM pada Peringatan Hari HAM Sedunia Ke-75. Penghargaan tersebut atas upaya membina dan membangun seluruh kabupaten/kota Peduli Hak Asasi Manusia pada Tahun 2024 dalam meraih predikat kabupaten/kota Peduli Hak Asasi Manusia pada Tahun 2024;
44. Pada Anugerah Adinata Syariah 2024 Pemda DIY meraih penghargaan pada 5 kategori:
 - a. Juara 1 Kategori Program Inkubasi Usaha Syariah (Anugerah Adinata Syariah 2024);
 - b. Pemda DIY Juara 2 Kategori Keuangan Sosial Syariah (Anugerah Adinata Syariah 2024);
 - c. Pemda DIY Juara 2 Kategori Program Inovasi pada Sektor Ekonomi Syariah (Anugerah Adinata Syariah 2024);
 - d. Pemda DIY Juara 2 Kategori Industri Halal (Anugerah Adinata Syariah 2024);
 - e. Pemda DIY Juara 5 Kategori Pendidikan dan Pemberdayaan Ekonomi Pesantren (Anugerah Adinata Syariah 2024).
45. Penghargaan sebagai Finalis Wilayah Implementasi Implementasi Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) Terbaik Kategori Provinsi Tahun 2024;
46. Anugerah Humas Indonesia 2024 kategori program kehumasan pemerintah sub kategori pemerintah daerah provinsi – Perunggu 11 Oktober 2024;
47. Pada tahun 2024, DIY Pagelaran Spekta Budaya Nuswantara dengan Pentas Wayang Kulit selama 15 hari – 15 malam yang diselenggarakan Pemda DIY memperoleh rekor MURI dalam kategori pentas terlama;
48. Dalam acara Rapat Kerja Nasional yang diselenggarakan oleh Ditjen Dukcapil secara daring dengan tema Evaluasi Kegiatan Tahun 2024 dan Rencana Kegiatan Tahun 2025 ditayangkan Cakupan Kinerja Dinas Dukcapil Daerah Tahun 2024 dan DIY menduduki peringkat dengan provinsi terbaik pada beberapa indikator capaian kinerja di antaranya adalah sebagai berikut;
 - a. Peringkat 8 Provinsi Dengan Cakupan Perekam KTP-EI Tertinggi;
 - b. Peringkat 2 Provinsi Dengan Cakupan Kepemilikan KIA Tertinggi;
 - c. Peringkat 3 provinsi dengan cakupan kepemilikan Akta Kelahiran Anak;
 - d. Peringkat 3 provinsi dengan cakupan aktivasi IKD tertinggi.

Foto Penghargaan Penyampaian Laporan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 Di Daerah.



Sumber: Humas Pemda DIY, 2024

Foto Penyerahan Penghargaan 10 Provinsi Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Tani Hutan Tertinggi Nasional



Sumber: Humas KLHK RI, 2024

Foto Penyerahan Penghargaan Hasil Pengawasan Kearsipan Terbaik I Nasional



Sumber: Humas Pemda DIY, 2024

Foto Penghargaan *Aspiring Geopark* Nasional Terbaik dalam Anugerah Bangsa Berwisata di Indonesia (ABBWI) 2024



Sumber: Biro PIWP2 Setda DIY, 2024



**Tingkatkan Literasi Keuangan
untuk Kemajuan Ekonomi**

Sumber: Humas Pemda DIY, 2024

SELAMAT

PEMERINTAH DAERAH DIY

MERAIH PENGHARGAAN INABUYER AWARD 2024

KATEGORI PEMERINTAH PROVINSI

DARI KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM RI

Sesuai pasal 97 UU Cipta Kerja dan pasal 81 PP Nomor 7 Tahun 2021, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 40% produk/jasa UMKM dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri, dalam pengadaan barang/jasa. Dengan diberikannya penghargaan ini kepada Pemda DIY, tentu ini menjadi bukti bahwa **Pemda DIY berkomitmen penuh** untuk melaksanakan amanat UU Cipta Kerja dan PP Nomor 7 Tahun 2021 tersebut,"

Srie Nurkyatsiwi
Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY

Sumber: Humas Pemda DIY, 2024

Foto Penghargaan Bhumandala Award Tahun 2024



Sumber: Humas Pemda DIY, 2024

Foto Penghargaan Anugerah Kebudayaan Indonesia oleh Kementerian Kebudayaan



Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2025

Demikian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah DIY Tahun 2024 kami sampaikan dengan harapan akan memperoleh tanggapan serta masukan dari masyarakat untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik. Kami menyadari masih terdapat program dan kegiatan yang belum sesuai dengan harapan masyarakat. Oleh karena itu, masukan yang bersifat konstruktif senantiasa kami harapkan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa program yang telah mencapai hasil optimal merupakan kerja keras semua pihak, baik di jajaran Pemerintah Daerah DIY maupun Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota, swasta dan masyarakat. Untuk itu Pemda DIY memberikan penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginya atas partisipasi dan dukungannya.

Wassalamu 'alaikum warahmatullaahi wa barakatuh.

Yogyakarta, 12 Maret 2025

